



PEMERINTAH
KOTA PALU

LAPORAN

2022



**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA PALU**



H. HADIANTO RASYID

RENY LAMADJIDO

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirahim

dengan baik. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Selain itu, laporan ini juga sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Palu kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2022 merupakan laporan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021–2026 yang berisi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Palu beserta upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai target serta menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Laporan ini juga memuat efisiensi yang dihasilkan dari implementasi SAKIP hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Palu tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Palu Tahun 2022 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 serta sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun berikutnya.

WALI KOTA PALU



H. HADIANTO RASYID, S.E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	9
IKHTISAR EKSEKUTIF	10
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Gambaran Umum Kota Palu	12
1.2 Pembangunan Manusia Kota Palu	14
1.3 Perekonomian Kota Palu	15
1.4 Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Palu	16
1.5 Isu Strategis Pemerintah Kota Palu	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Visi Dan Misi	19
2.2 Indikator Kinerja Utama	28
2.3 Perjanjian Kinerja	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1 Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Palu	40
1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022	42
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021	42
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD (2021-2026)	44
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan ..	48
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	64
3.2 Realisasi Anggaran	83
1. Pendapatan	83
2. Belanja Daerah	84
3. Pembiayaan	84
3.3 Inovasi Pemerintah Kota Palu	85
BAB IV PENUTUP	92
LAMPIRAN	93
1. Perjanjian Kinerja	94
2. Indikator Kinerja Utama	101
3. Penghargaan	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Strategis Daerah Kota Palu 2021-2026	22
Tabel 2.2	Sasaran Strategis daerah 2021-2026 Setelah Perubahan	27
Table 2.3	Indikator Kinerja Utama	28
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Sesudah Perubahan.....	33
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	35
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	37
Tabel 3.1	Skala Nilai Capaian Indikator Kinerja.....	40
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Berdasarkan RPJMD 2021-2026	40
Tabel 3.3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021	42
Tabel 3.4	Perbandingan Target Kinerja dalam RPJMD (2021-2026)	45
Table 3.5	Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi	49
Tabel 3.6	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	49
Tabel 3.7	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	50
Tabel 3.8	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Infrastruktur yang Berketahanan	51
Tabel 3.9	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kesesuaian Ruang Berdasarkan Mitigasi Bencana	51
Tabel 3.10	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Ketangguhan Kota ...	52
Tabel 3.11	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan .	55
Tabel 3.12	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	55
Tabel 3.13	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial.....	56
Tabel 3.14	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengembangan Karakter berdasarkan Nilai Keagamaan, Kearifan Lokal, dan Kebangsaan.....	57
Tabel 3.15	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Pemerintahan.....	58
Tabel 3.16	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu Aparatur Sipil Negara.....	61
Tabel 3.17	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik.....	61

Tabel 3.18	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengembangan Inovasi Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	62
Tabel 3.19	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Penataan Regulasi Daerah.....	63
Tabel 3.20	Perbandingan Target dan Realisasi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022	64
Tabel 3.21	Efisiensi Anggaran Pencapaian Target Sasaran Straegis Tahun 2022	68
Tabel 3.22	Realisasi Pendapatan Dearah Kota Palu Tahun 2022.....	71
Tabel 3.23	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2022	84
Tabel 3.24	Pembiayaan Pemerintahan Kota Palu Tahun Anggaran 2022....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Wilayah Kota Palu.....	13
Gambar 1.2	Struktur Umum dan Jumlah Penduduk Kota Palu	13
Gambar 1.3	IPM Kota Palu Tahun 2017-2022	15
Gambar 1.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Tahun 2017-2022....	15
Gambar 2.1	Visi dan Misi Pemerintahan.....	19
Gambar 2.2	Hubungan Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026	21
Gambar 2.3	Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026.....	21
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan PDRB	48
Gambar 3.2	Indeks Pembangunan Manusia	53
Gambar 3.3	Harapan Lama Sekolah	54
Gambar 3.4	Rata-rata Lama Sekolah.....	54
Gambar 3.5	<i>Coaching</i> SAKIP bersama Kementerian PAN-RB.....	59
Gambar 3.6	<i>Coaching</i> SAKIP bersama Kementerian PAN-RB.....	60
Gambar 3.7	Implementasi Reformasi Birokrasi bersama Kementerian PAN-RB.....	60



PEMERINTAH
KOTA PALU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PALU 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palu berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangan. Prinsip *Good Governance* meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan visi lima tahun kedepan telah ditetapkan 4 Misi, 15 Sasaran Strategis dan 33 Indikator Kinerja Utama. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk indikator sasaran untuk tahun kedua (Tahun 2022) periode perencanaan 2021-2026 yakni sebesar 102,49% (Sangat Tinggi). Sementara untuk rata-rata capaian sasaran pembangunan Kota Palu Tahun 2022 sebesar 101,76 % atau kategori sangat tinggi.



BAB 1

PENDAHULUAN

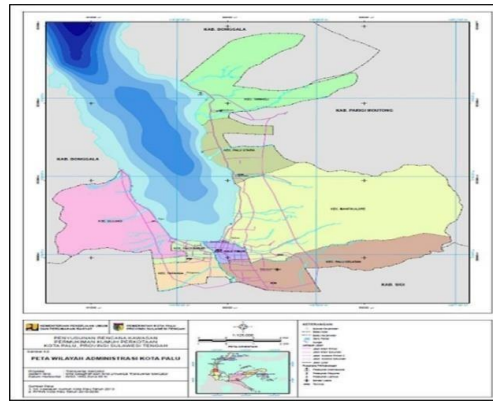
PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM KOTA PALU

Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 395,06 km² berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Secara astronomis Kota Palu terletak pada 0°,36" - 0,56"° Lintang Selatan dan 119°,45" - 121 °, 1" Bujur Timur. Secara administratif, Kota Palu berbatasan sebelah utara dengan dengan Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, sebelah selatan dengan Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Sementara sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala.

Wilayah Kota Palu terbagi atas 8 (delapan) kecamatan dan 46 (empat puluh enam) kelurahan, 289 Rukun Warga, dan 1.030 Rukun Tetangga. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km² (52,35%) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km² atau hanya 1,95% dari luas wilayah Kota Palu. Sebagian besar kelurahan berada pada dataran Lembah Palu yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, sementara 17 (tujuhbelas) kelurahan lainnya berada di sepanjang pantai Teluk Palu.

Letak wilayah Kota Palu menurut kecamatan tergambar pada peta Kota Palu sebagaimana Gambar 1.1 sebagai berikut :

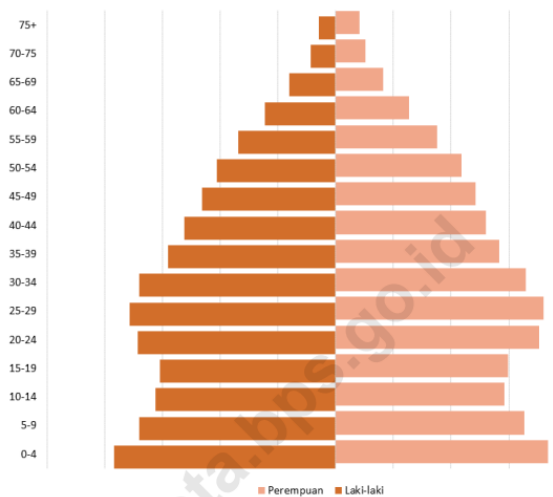


Gambar 1.1

Peta Administrasi Wilayah Kota Palu

Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Tahun 2022

Jumlah penduduk Kota Palu per 31 Desember 2022 sebesar 381.572 jiwa (BPS,2023), dengan kepadatan penduduk sebesar 966 per km². Adapun penduduk laki-laki berjumlah 191.052 jiwa (50,06%) dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 190.520 jiwa (49,94 %) sehingga rasio jenis kelamin (*Population Sex Ratio*) sebesar 100,28%. Kota Palu memiliki struktur usia penduduk yang berbentuk piramida ekspansif, dengan sebaran didominasi usia produktif. Sebaran struktur umur penduduk Kota Palu Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini :



Gambar 1.2

Struktur Umur dan Jumlah Penduduk Kota Palu

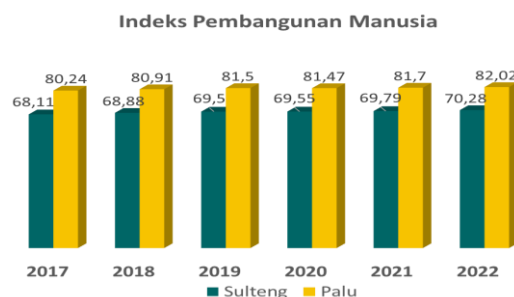
Sumber : Kota Palu Dalam Angka, 2023

Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif, maka rasio ketergantungan penduduk Kota Palu Tahun 2022 sebesar 30,84 %. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk produktif di Kota Palu menanggung beban 31 penduduk tidak produktif.

1.2 PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PALU

Kualitas pembangunan sebuah wilayah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM terdiri dari variabel pendidikan, variabel kesehatan, dan variabel kondisi ekonomimasyarakat. Variabel kesehatan meliputi indikator usia harapan hidup, variabel pendidikan meliputi indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sementara kondisi masyarakat berdasarkan indikator daya beli masyarakat dengan melihat pengeluaran per kapita penduduk.

IPM Kota Palu termasuk kategori tinggi dengan capaian 82,02 di Tahun 2022. Capaian ini mendudukkan Kota Palu sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sulawesi Tengah. Tingginya IPM Kota Palu ditopang oleh peningkatan usia harapan hidup dari Tahun 2021 sebesar 71,09 tahun menjadi 71,2 tahun di Tahun 2022. Untuk komposit pendidikan, dari rata-rata lama sekolah selama 11,72 tahun di Tahun 2021 menjadi 11,73 tahun di Tahun 2022. Untuk harapan lama sekolah dari 16,28 tahun di Tahun 2021 menjadi 16,36 Tahun di 2022. Selanjutnya, indikator ekonomi terjadi perbaikan standar hidup yang layak dari sebelumnya. Hal ini dilihat dari pengeluaran perkapita sebesar 14,89 juta Tahun 2021 menjadi 15,16 juta di Tahun 2022. Trend perkembangan IPM Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 1,3 di bawah ini :

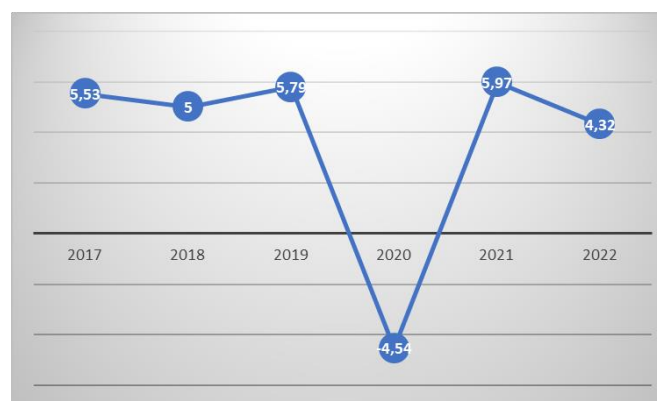


Gambar 1.3
IPM Kota Palu Tahun 2017-2022
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palu, 2023

1.3 PEREKONOMIAN KOTA PALU

Kebijakan pembangunan Kota Palu sesuai dengan tema pembangunan Kota Palu Tahun 2022 yakni membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global. Pemilihan tema ini mampu mendorong bangkitnya kembali perekonomian Kota Palu pasca bencana alam dan dampak bencana non alam (Covid-19).

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Palu mengalami kontraksi pada Tahun 2022 yakni tumbuh sebesar 4,32 %. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 lebih melambat dibandingkan Tahun 2021 yakni sebesar 5,97 %. Untuk PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2022 sebesar 28,44 triliun. Selanjutnya, PDRB perkapita sebesar 74,54 juta. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Palu Tahun 2017 hingga Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.4 di bawah ini :



Sumber : Kota Palu Dalam Angka, 2023.

Gambar 1.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Tahun 2017-2022

Melihat kontribusi lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022, maka lapangan usaha konstruksi berkontribusi paling besar yakni sebesar 18,17 %, disusul lapangan usaha administrasi pemerintahan,

pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 14,11 %, selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 11,23 %.

1.4 SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KOTA PALU

Pemerintah Kota Palu dipimpin oleh Walikota, H. Hadianto Rasyid, S.E dan Wakil Walikota, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes sesuai hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020. Adapun periode menjabat yakni dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Pelaksanaan tugas Wali Kota Palu dan Wakil Walikota Palu dibantu oleh Sekretaris Daerah beserta organisasi perangkat daerah.

Merujuk Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas sebanyak 23 Dinas;
5. Badan Daerah sebanyak 6 Badan; dan
6. Kecamatan sebanyak 8 Kecamatan.

Pelaksanaan urusan pemerintah untuk menjalankan roda Pemerintah Kota Palu didukung oleh sumber daya aparatur. Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Palu Tahun 2022 sebanyak 5.931 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 1.885 laki-laki atau 31,78 % dan 4.046 perempuan atau 68,22 %. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, rata-rata pendidikan PNS di Kota Palu adalah setingkat strata satu yakni sebesar 58,3 %. Sementara, strata dua sebesar 10,2 %, tingkat Diploma sebesar 16,96 %, SMA sebesar 14 % dan SD dan SLTP masing-masing sebesar 0,1 % dan 0,34 %.

1.5 ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA PALU

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang (Permendagri 86 Tahun 2017). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor Tahun 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, diuraikan isu strategis Pemerintah Kota Palu, sebagai Berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan merata;
- 2) SDM unggul, tangguh, dan berdaya saing;
- 3) Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusi Kemiskinan kota;
- 4) Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklimserta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 5) Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- 6) Pencapaian target dan sasaran Tujuan Pembangunan berkelanjutan.

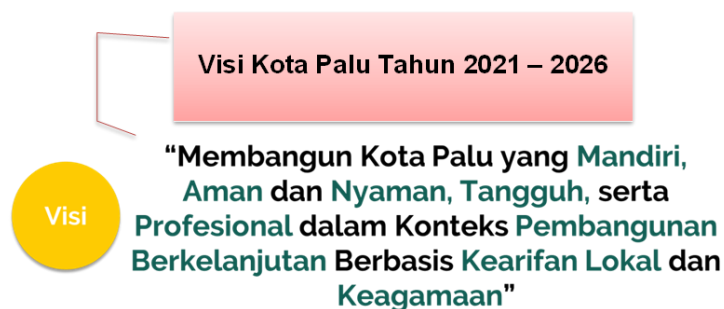
BAB II



**PERENCANAAN
KINERJA**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI



Gambar. 2.1
Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu

Tahun 2020 Kota Palu melakukan pemilihan kepala daerah. Kontestasi tersebut, menetapkan H. Hadianto Rasyid, S.E Wali Kota Palu Kota Palu dan dr. Reny A. Lamadjido, M.Kes.,Sp.PK sebagai Wakil Wali Kota Palu terpilih untuk periode 2021-2026. Pelantikan Wali Kota dan WakilWali Kota terpilih dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan untuk menyusun dan menetapkan RPJMD paling lambat enam bulan setelah pelantikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026, ditetapkan visi dan misi Kota Palu.



Gambar. 2.2
Hubungan Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026

Prioritas pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan prioritas pembangunan daerah Kota Palu juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2021-2026 yang diuraikan ke dalam enam Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Ekonomi Mantap Berdaya Saing;
2. Lingkungan Mantap Berkelanjutan;
3. Infrastruktur Mantap Berketahanan;
4. SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter;
5. Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas; dan
6. Pemerintahan Mantap Melayani.



Infrastruktur Mantap Berketahanan

1. Bangun Palu Tahan Gempa (Palu Tangguh Bencana)
2. Pembangunan Gudang Logistik Bencana
3. Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami)
4. Pembangunan Kawasan Olahraga Kota Palu
5. Ruang Terbuka Hijau/Publik per Kecamatan
6. Pembangunan Gedung Kesenian Kota Palu



SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter

1. Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Kerja Masyarakat Padat Karya
2. Badan Pelayanan Rumah Ibadah
3. Palu Berbagi
4. Palu Religi
5. Pelestarian Seni Budaya
6. Palu Ramah Difable
7. Event Tahunan Olahraga Kota Palu
8. Event Tahunan Komunitas Anak Muda Kota Palu



Ekonomi Mantap Berdaya Saing

1. Rp 4 Miliar untuk Bedah Rumah + Modal Usaha
2. Inkubator Bisnis Berbasis Digital per Kelurahan
3. Penguatan UMKM dan Palu Market Place
4. Revitalisasi Perparkiran Kota Palu
5. Reformasi dan Revitalisasi Moda Transportasi
6. Kawasan Ekonomi Kreatif dan Wisata Religi
7. Kawasan Agrowisata Layana dan Petobo
8. Revitalisasi Pasar Berbasis Segmentasi
9. Wisata Pasar Ikan Kota Palu
10. 1.000 Perahu untuk Nelayan Kota Palu
11. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
12. Forum Komunitas Kreatif Kota Palu (Palu Creative Hub)



Lingkungan Mantap Berkelanjutan

1. Palu Adipura
2. Palu Terang
3. Palu Hijau
4. Palu Ramah, Aman, dan Tertib
5. CSR Forum
6. Satgas Cepat Tanggap
7. Kelurahan Mantap 2 Miliar



Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas

Kesehatan

1. Palu Kota Sehat
2. Transformasi Puskesmas menjadi Klinik Modern
3. Satu Ambulans Satu Kelurahan
4. BPJS Gratis Warga Tidak Mampu
5. Tunjangan Kesehatan dan Santunan Duka RT/RW dan Petugas Rumah Ibadah

Pendidikan

1. 1.000 Beasiswa Keluarga Tidak Mampu
2. Reward 2 Miliar Prestasi SD dan SMP
3. Persamaan Kualitas SD dan SMP se-Kota Palu
4. Pelatihan Tenaga Kerja Bersertifikat per Kelurahan
5. Update Berkala Kompetensi & Kapasitas Guru/Pengajar
6. Bus Gratis untuk Siswa Sekolah
7. Kepala Sekolah Magang Nasional



Pemerintahan Mantap Melayani

1. Audit APBD oleh Auditor Independen
2. E-Government (Palu Smart City)
3. Penerapan QSL (Quick Service License)
4. One Touch Info Kota Palu
5. Penerapan ISO atas Pelayanan Publik di Semua Instansi
6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Honorer
7. ASN Magang Nasional
8. Pelayanan Pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Dokumen Kependudukan Lainnya di Kelurahan

Gambar 2.3
Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026

Palu Mantap Bergerak merupakan perwujudan dari visi Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable development*) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu Kota Cerdas (*smart city*), Kota tangguh (*Resilience city*), Kota hijau (*green city*), dan Kota inklusif (*inclusive city*). Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator pembangunan Kota Palu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Daerah Kota Palu 2021 - 2026

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Membangun Kota Palu yang Mandiri Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan keagamaan	1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	
					Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	
					Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	
	2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana	Indeks Kota layak huni	Indeks Kota layak huni	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kota Layak Huni
						Indeks Risiko Bencana
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
						Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan
			Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks ketentraman dan ketertiban		

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)
			Presentase Jalan yang berkeselamatan	Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan	Presentase Jalan yang berkeselamatan
			Layanan angkutan darat		Layanan angkutan darat
			Persentase luas Kawasan kumuh		Persentase luas Kawasan kumuh
			Persentase rumah tidak layak huni		Persentase rumah tidak layak huni
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW
			Indeks ketangguhan kota		Indeks ketangguhan kota

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan		Indeks Pembangunan Manusia
Harapan lama sekolah			Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan lama sekolah	
Rata-rata lama sekolah				Rata-rata Lama Sekolah	
Angka harapan hidup masyarakat			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	
<i>Case fatality rate covid-19</i>			<i>Case fatality rate covid-19</i>		
Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS) yang diberdayakan		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS) yang diberdayakan		
Indeks Pembangunan Gender			Indeks Pembangunan Gender		

			Indeks Kota Layak Anak		Indeks Kota Layak Anak
			Indeks kerukunan umat beragama	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks kerukunan umat beragama
			Indeks aktualisasi pancasila		Indeks aktualisasi pancasila
			Indeks pembangunan kebudayaan		Indeks pembangunan kebudayaan
	4. Menciptakan pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani		Indeks reformasi birokrasi		Indeks reformasi birokrasi
			Opini BPK	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah	Opini BPK
			Nilai evaluasi AKIP		Nilai evaluasi AKIP
			Tingkat maturitas SPIP		Tingkat maturitas SPIP
			Indeks Profesional ASN	Meningkatnya mutu aparatur sipil negara	Indeks Profesional ASN
			Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik

			Indeks Inovasi daerah	Meningkatnya pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informas	Indeks Inovasi daerah
			Nilai indeks sistem pemerintahan berbasis (SPBE)		Nilai indeks sistem pemerintahan berbasis (SPBE)
			Indeks kualitas kebijakan	Meningkatnya penataan regulasi daerah	Indeks kualitas kebijakan

Selanjutnya berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi LAKIP Pemerintah Kota Palu Tahun 2022 oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia perlu melakukan perumusan kembali sasaran strategis pada level Pemerintah daerah agar lebih mengutamakan kondisi kinerja yang menjawab isu strategis dan menggambarkan kondisi hasil/*outcome* pada level Pemerintah daerah. Hasil perbaikan sasaran strategis dan indikator kinerja diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Daerah 2021 - 2026 Setelah Perubahan

Visi	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Membangun Kota Palu yang Mandiri Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan keagamaan	1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.	1. Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	1. Laju pertumbuhan ekonomi
	2. Membangun Kembali Tatanan Lingkungan yang Aman dan Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	1. Indeks resiko bencana
			2. Indeks kualitas lingkungan hidup
			3. Indeks kewaspadaan nasional
			4. Persentase jalan yg berkeselamatan
			5. Persentase luas kawasan kumuh
			6. Persentase Rumah tidak layak huni
	3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19	1. Meningkatnya kualitas SDM 2. Menurunnya angka kemiskinan 3. Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	1. Indeks pembangunan manusia
			2. Angka kemiskinan
			3. Indeks kerukunan umat beragama
			4. Indeks aktualisasi Pancasila
	4. Menciptakan Pemerintah yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1. Indeks Reformasi Birokrasi
			2. Opini BPK

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021 - 2026. IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan terhadap sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun IKU Pemerintah Kota Palu Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Formula	OPD
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	1.	Laju pertumbuhan ekonomi	$R = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100$	Dinas Koperasi, UMKM Dan Tenaga Kerja Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
		2.	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	Jumlah PDRB Sektor Sekunder dibagi PDRB x 100.	Dinas Koperasi, UMKM Dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sekretariat Daerah Kota Palu
		3.	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	Jumlah PDRB Sektor Tersier dibagi PDRB x 100	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika.
2.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	4.	Indeks kota layak huni	Publikasi Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP)	Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		5.	Indeks resiko bencana	Publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		6.	Indeks kualitas Lingkungan hidup	IKLH = (30% x Indeks Kualitas Air + 30% x Indeks Kualitas Udara + 40% x Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum
3.	Meningkatnya keamanan dan	7.	Indeks ketentraman dan ketertiban	Publikasi Kepolisian RI	Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesbangpol

	ketertiban lingkungan				
4.	Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan.	8.	Persentase jalan yang berkeselamatan	Panjang jalan yang memenuhi standar keselamatan dibagi panjang jalan kota di kali 100	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup
		9.	Persentase layanan angkutan darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum
		10.	Persentase luas Kawasan Kumuh.	$\text{Nilai Rerang (NR)} = \frac{[\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}]}{3}$ <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori kumuh berat pada nilai = 55-75 2. Kategori kumuh sedang pada nilai = 35-54 3. Kategori kumuh ringan pada nilai = 15-34. 	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		11.	Persentase rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah layak huni dikali 100.	Dinas Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum
5.	Meningkatnya kesesuaian ruang berbasis mitigasi bencana	12.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Perbandingan antara Pemanfaatan (penggunaan) lahan eksisting dengan rencana tata ruang wilayah dikali 100	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Meningkatnya ketangguhan kota	13.	Indeks ketangguhan Kota	Formula Dissaster Resilience Assesment (United Nations Office for Disaster Risk Reduction)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.	Meningkatnya kualitas Pendidikan	14.	Indeks pembangunan manusia	$IPM = \sqrt[3]{\text{Kesehatan} \times \text{pendidikan} \times \text{pengeluaran}} \times 100$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas
		15.	Harapan Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{72} \times \sum_{i=1}^{72} d_i$ <p><small>dimana RLS = Harapan Lama Sekolah terakumulasi penduduk, umur 20 tahun ke atas d_i = Jumlah penduduk penduduk usia i tahun keatas 20 tahun N = Jumlah penduduk umur 20 tahun ke atas.</small></p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		16.	Rata Rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana: RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	17.	Angka harapan hidup	Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup (Publikasi BPS).	Dinas Kesehatan RSU Anutapura
		18.	Case Fatality Covid-19	$CFR = \frac{\text{Jumlah kematian Akibat penyakit dalam periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah penyakit yang terdiagnosa dalam periode waktu yang sama}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan RSU Anutapura
9.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	19.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan.	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terberdayakan dibagi Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dikali 100.	Dinas Sosial Kecamatan
		20.	Indeks Pembangunan Gender	IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki	Dinas Perhubungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		21.	Indeks Kota layak Anak	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten / Kota Layak Anak}}{\text{Jumlah Kabupaten / Kota di Provinsi}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu

10.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	22.	Indeks Kerukunan umat Beragama	Hasil penilaian Kementerian Agama Republik Indonesia	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah
		23.	Indeks Aktualisasi Pancasila	$IAP = \sum_{i=1}^s (W_i \times SX_i)$ <p>IAP : Indeks Aktualisasi Pancasila W_j : Bobot indikator ke-i SX_j : nilai indikator ke-i yang telah dinormalisasi</p>	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		24.	Indeks pembangunan kebudayaan	$Indeks D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \cdot 100$ <ul style="list-style-type: none"> - SX_{ji} adalah nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi - n_j adalah banyaknya indikator dimensi ke- - D_j adalah indeks dimensi ke-j $IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \cdot Indeks D_j)$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IPK adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan - D_j adalah Dimensi ke-j - W_j adalah Bobot Dimensi ke-j 	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Pemerintahan	25.	Indeks Reformasi Birokrasi	Publikasi Hasil Penilaian Kemenpan-RB.	Sekretariat Daerah dan Seluruh OPD
26.		Opini BPK	Hasil Audit BPK	BPKAD, Itkot, dan Seluruh OPD	
27.		Nilai Evaluasi AKIP	Penilaian Kemenpan RB	Sekretariat Daerah dan Seluruh OPD	

12.	Meningkatnya mutu Aparatur Sipil Negara	28.	Tingkat maturitas SPIP	Penilaian BPKP	Itkot
		29.	Indeks profesionalitas ASN	<p>$idPro = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (sp_{i1} + sp_{i2} + sp_{i3} + sp_{i4} + sp_{i5})$</p> <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sp_{i1} adalah % ahli yang tidak kompeten • sp_{i2} adalah angka SPK • sp_{i3} adalah selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja PNS untuk jabatan yang sama (R1) • sp_{i4} adalah jumlah pelanggaran disiplin 	
13.	Meningkatnya kinerja pelayanan Publik	30.	Indeks Pelayanan Publik	<p>1. Menentukan nilai untuk setiap indikator</p> <p>$W = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (w_i \cdot x_i)$; $n = \text{peroid}$</p> <p>2. Menentukan nilai setiap aspek</p> <p>$W = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (w_i \cdot x_i)$; $n = \text{peroid}$</p> <p>3. Menentukan indeks</p> <p>$W = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (w_i \cdot x_i)$; $n = \text{peroid}$</p>	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
14.	Meningkatnya pengembangan Inovasi daerah dan pemanfaatan Teknologi Informasi	31.	Indek Inovasi Daerah	<p>$I = 2(2S_{x1} + 2S_{x2} + 2.5S_{x3} + 3.5S_{x4})$</p> <p>$S_{x1}$ = score dimensi input S_{x2} = score dimensi proses S_{x3} = score dimensi output S_{x4} = score dimensi outcome</p> <p>Adapun formula perhitungan masing-masing dimensi adalah sebagai berikut.</p> <p>1. Dimensi Input</p> <p>Terdiri dari 10 indikator, sehingga rumus perhitungan dimensi input adalah:</p> $S_{x1} = \frac{1}{10} (S_{x1.1} + \dots + S_{x1.10})$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> $S_{x1.1}$ = Via Inovasi $S_{x1.2}$ = Komitmen Perubahan $S_{x1.3}$ = Reward bagi Inovator $S_{x1.4}$ = Kebijakan Pendorong Inovasi $S_{x1.5}$ = Kapasitas SDM Inovasi $S_{x1.6}$ = Kepedulian SDM terhadap Inovasi $S_{x1.7}$ = Pengembangan SDM Inovasi $S_{x1.8}$ = Dukungan Anggaran $S_{x1.9}$ = Optimalisasi CSR dalam Mendukung Inovasi $S_{x1.10}$ = Pendanaan TI dalam Sistem Kerja <p>3. Dimensi Output</p> <p>Terdiri dari 20 indikator, sehingga rumus perhitungan dimensi output adalah:</p> $S_{x3} = \frac{1}{20} (S_{x3.1} + \dots + S_{x3.20})$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> $S_{x3.1}$ = Jumlah Inovasi yang Dihilangkan $S_{x3.2}$ = Jenis Inovasi yang Dihilangkan $S_{x3.3}$ = Kualitas Inovasi $S_{x3.4}$ = Kebijakan Pendorong Inovasi $S_{x3.5}$ = Pelembagaan Inovasi $S_{x3.6}$ = Ketersediaan Informasi Layanan $S_{x3.7}$ = Penyelesaian Layanan Pengaduan $S_{x3.8}$ = Tingkat Kepuasan Layanan Publik $S_{x3.9}$ = Peningkatan Jumlah Perizinan $S_{x3.10}$ = Peningkatan Pendaftar Perkapta $S_{x3.11}$ = Peningkatan Lulusan Kerja $S_{x3.12}$ = Peningkatan Investasi $S_{x3.13}$ = Penurunan Angka Kemiskinan $S_{x3.14}$ = Peningkatan PAD $S_{x3.15}$ = Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan $S_{x3.16}$ = Tingkat Partisipasi Stakeholders $S_{x3.17}$ = Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan $S_{x3.18}$ = Nilai Cleanliness LAMP $S_{x3.19}$ = Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan $S_{x3.20}$ = Peningkatan Nilai IPM 	Badan Litbang dan Seluruh OPD
		32.	Nilai Indeks Sistem Pemerintahanberbasis Elektronik SPBE	Hasil Penilaian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika	
15.	Meningkatnya penataan regulasi daerah	33.	Indeks kualitas kebijakan	Formula sesuai surat edaran Kepala LAN RI Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan	Sekretariat Daerah

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu ditetapkan dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021 - 2026.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Sesudah Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Formula	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	1. Laju pertumbuhan ekonomi	$R = \frac{PDB_{t} - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100$	Dinas Koperasi, UMKM Dan Tenaga Kerja Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Dan kesiapsiagaan bencana	2. Indeks resiko bencana	Publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		3. Indeks kualitas Lingkungan hidup	IKLH = (30% x Indeks Kualitas Air + 30% x Indeks Kualitas Udara + 40% x Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	4. Indeks kewaspadaan nasional	NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.	Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan	5. Persentase jalan yang berkeselamatan	Panjang jalan yang memenuhi standar keselamatan dibagi panjang jalan kota di kali 100	Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan.
		6. Persentase luas Kawasan kumuh	1. Kategori kumuh berat pada nilai = 55-75. 2. Kategori kumuh sedang pada nilai = 35-54.	Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Dinas Pekerjaan Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Formula	Penanggung jawab
			3. Kategori kumuh ringan pada nilai = 15-34.	
		7. Persentase rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah layak huni dikali 100	Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Dinas Pekerjaan Umum
5	Meningkatnya Kualitas SdM	8. Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{\text{keseluruhan } \sqrt{\text{pendapatan}} + \sqrt{\text{pendidikan}} + \sqrt{\text{perubahan}}} \times 100$	Dinas Perhubungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
6	Menurunnya Angka Kemiskinan	9. Angka Kemiskinan	Target – (Realisasi – <u>Target</u>) x100% Target	Dinas Sosial, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
7	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	10. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Hasil Penilaian Kementerian Agama Republik Indonesia	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		11. Indeks Aktualisasi Pancasila	$IAP = \frac{\sum_{j=1}^n (W_j \times SX_j)}{\sum_{j=1}^n W_j}$ IAP : Indeks Aktualisasi Pancasila Wj : Bobot indikator ke-i SXj : nilai indikator ke-i yang telah dinormalisasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	12. Indeks Reformasi Birokrasi	Publikasi Hasil Penilaian Kepmenpan RB	Sekretariat Daerah dan Seluruh OPD
		13. Opini BPK	Publikasi BPK	BPKAD, Itkot, dan Seluruh OPD

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu ditetapkan dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021 - 2026. IKU tersebut, merupakan ukuran keberhasilan berdasarkan hasil evaluasi dengan melakukan pemetaan isu strategis pemerintah Kota Palu sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah kota palu Tahun 2021- 2026, maka dilakukan perubahan indikator kinerja utama yang selanjutnya menjadi Rujukan dalam penyusunan perjanjian kinerja pemerintah kota palu tahun 2023. Perubahan tersebut meliputi perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja, jumlah sasaran strategi sebelum perubahan Tabel 2.4 sebanyak 13 sasaran strategis.

4.3 Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Palu Tahun 2022, merupakan tolok ukur pengukuran capaian kinerja Tahun 2022, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PK terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pernyataan Perjanjian Kinerja dan lampiran Perjanjian Kinerja. Gambaran Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2022 dapat diuraikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	1.	Laju pertumbuhan ekonomi	3,21
		2.	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	27,22
		3.	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	64,57
2.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	4.	Indeks kota layak huni	60
		5.	Indeks resiko bencana	137,62
		6.	Indeks kualitas Lingkungan hidup	74,26
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	7.	Indeks ketentraman dan ketertiban	100
4.	Meningkatnya konektivitas wilayah	8.	Persentase jalan yang berkeselamatan	2.74
		9.	Persentase layanan angkutan darat	19,51

	dan infrastruktur yang berketahanan.	10.	Persentase luas Kawasan kumuh	0,55
		11.	Persentase rumah tidak layak huni.	10,85
5.	Meningkatnya kesesuaian ruang berbasis mitigasi bencana	12.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	80
6.	Meningkatnya ketangguhan kota	13.	Indeks ketangguhan Kota	400
7.	Meningkatnya kualitas Pendidikan	14.	Indeks pembangunan manusia	81,70
		15.	Harapan Lama Sekolah	16.50
		16.	Rata Rata Lama Sekolah	11.63
8.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	17.	Angka harapan hidup	71,40
		18.	Case Fatality Covid-19	1,75
9.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	19.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS yang diberdayakan.	60
		20.	Indeks Pembangunan Gender	98,05
		21.	Indeks Kota layak Anak	Pratama
10.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	22.	Indeks Kerukunan umat Beragama	82,5
		23.	Indeks Aktualisasi Pancasila	68
		24.	Indeks pembangunan Kebudayaan	51,56
11.	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Pemerintahan	25.	Indeks Reformasi Birokrasi	66
		26.	Opini BPK	WTP
		27.	Nilai Evaluasi AKIP	B
12.	Meningkatnya mutu Aparatur Sipil Negara	28.	Tingkat maturitas SPIP	LEVEL III
		29.	Indeks profesionalitas ASN	71
13.	Meningkatnya kinerja pelayanan Publik	30.	Indeks Pelayanan Publik	C
14.	Meningkatnya pengembangan Inovasi daerah dan pemanfaatan Teknologi Informasi	31.	Indek Inovasi Daerah	40
		32.	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik SPBE	1,8
15.	Meningkatnya penataan regulasi daerah	33.	Indeks kualitas kebijakan	75

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	1. Laju pertumbuhan ekonomi	3,73
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Dan kesiapsiagaan bencana	2. Indeks reiiiko bencana	125,08
		3. Indeks kualitas Lingkungan hidup	74,60
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	4. Indeks kewaspadaan nasional	
4.	Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan	5. Persentase jalan yang berkeselamatan	4,39
		6. Persentase luas Kawasan kumuh	0,31
		7. Persentase rumah tidak layak huni.	10,30
5.	Meningkatnya Kualitas Sdm.....	8. Indeks Pembangunan Manusia	81,90
6.	Menurunnya Angka Kemiskinan	9. Angka Kemiskinan	
7.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	10. Indeks Kerukunan Umat Beragama	83
		11. Indeks Aktualisasi Pancasila	69
8.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	12. Indeks Reformasi Birokrasi	78
		13. Opini BPK	WTP

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan mengacu pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026, dengan perubahan sasaran strategis menjadi 8 (delapan) dan indikator kinerja berjumlah 13 (tiga belas) indikator.

BAB III

AKUNTABILITAS — KINERJA —



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Palu dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui capaian sebagai umpan balik untuk perbaikan agar target kinerja dapat tercapai. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2022 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk permasalahan yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah(*problem solving*).

Untuk mempermudah pemaknaan atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Palu tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Capaian Indikator Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Interpretasi Realisasi Kinerja
1.	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3.	65,01% ≤ 75%	Sedang
4.	50,01% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palu

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Tahun 2022 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Berdasarkan RPJMD 2021 – 2026

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022	
				Target	Realisasi
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	1.	Laju pertumbuhan ekonomi	3,21	4,32
		2.	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	27,22	24,91
		3.	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	64,57	64,84
2.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	4.	Indeks kota layak huni	60	58,9
		5.	Indeks resiko bencana	137,62	151,43
		6.	Indeks kualitas Lingkungan hidup	74,26	69
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	7.	Indeks ketentraman dan ketertiban	100	100
4.	Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan.	8.	Persentase jalan yang berkeselamatan	2,74	2,45
		9.	Persentase layanan angkutan darat	19,51	14,17
		10.	Persentase luas Kawasan kumuh	0,55	0,50

		11.	Persentase rumah tidak layak huni.	10,85	1,59
5.	Meningkatnya kesesuaian ruang berbasis mitigasi bencana	12.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	80	81,56
6.	Meningkatnya ketangguhan kota	13.	Indeks ketangguhan Kota	400	460,2
7.	Meningkatnya kualitas Pendidikan	14.	Indeks pembangunan manusia	81,70	82,02
		15.	Harapan Lama Sekolah	16,50	16,36
		16.	Rata Rata Lama Sekolah	11,63	11,73
8.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	17.	Angka harapan hidup	71,40	71,2
		18.	Case Fatality Covid-19	1,75	0,39
9.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	19.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS yang diberdayakan.	60	88,78
		20.	Indeks Pembangunan Gender	98,05	98,09
		21.	Indeks Kota layak Anak	Pratama	Belum pratama
e	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	22.	Indeks Kerukunan umat Beragama	82,5	87,5
		23.	Indeks Aktualisasi Pancasila	68	77,95
		24.	Indeks pembangunan Kebudayaan	51,56	NA
11.	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Pemerintahan	25.	Indeks Reformasi Birokrasi	66	58,88
		26.	Opini BPK	WTP	WTP
		27.	Nilai Evaluasi AKIP	B	B
12.	Meningkatnya mutu Aparatur Sipil Negara	28.	Tingkat maturitas SPIP	LEVEL III	LEVEL III
		29.	Indeks profesionalitas ASN	71	47,71
13.	Meningkatnya kinerja pelayanan Publik	30.	Indeks Pelayanan Publik	C	A
14.	Meningkatnya pengembangan Inovasi daerah dan pemanfaatan Teknologi Informasi	31.	Indek Inovasi Daerah	40	54,95
		32.	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik SPBE	1,8	1,06
15.	Meningkatnya penataan regulasi daerah	33.	Indeks kualitas kebijakan	75	NA

Sumber data: BPS Kota Palu dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu, diolah 2023

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
				Realisasi	Persentase Capaian Target	Realisasi	Persentase Capaian Target
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	1.	Laju pertumbuhan ekonomi	5,97	235,04	4,32	134,58
		2.	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	26,22	99,28	24,91	91,51
		3.	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	63,88	100,65	64,84	100,42
2.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	4.	Indeks kota layak huni			58,9	98,17
		5.	Indeks resiko bencana	162,7	108,35	151,43	89,97
		6.	Indeks kualitas Lingkungan hidup	69,84	94,48	69	92,92
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	7.	Indeks ketentraman dan ketertiban	100	100	100	100
4.	Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan.	8.	Persentase jalan yang berkeselamatan	NA	-	2,45	89,42
		9.	Persentase layanan angkutan darat	17,79	100	14,17	72,63
		10.	Persentase luas Kawasan kumuh	0,51	123,88	0,50	109,09
		11.	Persentase rumah tidak layak huni.	1,59	186,05	1,59	185,35

5.	Meningkatnya kesesuaian ruang berbasis mitigasi bencana	12.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	-	-	81,56	101,95
6.	Meningkatnya ketangguhan kota	13.	Indeks ketangguhan Kota	263	100	460,2	115,05
7.	Meningkatnya kualitas Pendidikan	14.	Indeks pembangunan manusia	81,70	100,28	82,02	100,39
		15.	Harapan Lama Sekolah	16,28	100,31	16,36	99,15
		16.	Rata Rata Lama Sekolah	11,72	100,95	11,73	100,86
8.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	17.	Angka harapan hidup	71,09	100,07	71,2	99,72
		18.	Case Fatality Covid-19	2,52	112,80	0,39	177,71
9.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	19.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS yang diberdayakan.	50	100	88,78	147,97
		20.	Indeks Pembangunan Gender	98,16	100,20	98,09	100,04
		21.	Indeks Kota layak Anak	Belum Pratama	-	Belum pratama	93,72
10.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	22.	Indeks Kerukunan umat Beragama	76,6	93,41	87,5	106,06
		23.	Indeks Aktualisasi Pancasila	-	-	77,95	114,63
		24.	Indeks pembangunan Kebudayaan	NA	0	NA	0,00
11.	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Pemerintahan	25.	Indeks Reformasi Birokrasi	56,34	112,52	58,88	89,21
		26.	Opini BPK	WTP	100	WTP	100,00
		27.	Nilai Evaluasi AKIP	B	100	B	100,00
12.		28.	Tingkat maturitas SPIP	Level III	120,00	LEVEL III	100,00

	Meningkatnya mutu Aparatur Sipil Negara	29.	Indeks profesionalitas ASN	40,32	80,64	47,71	67,20
13.	Meningkatnya kinerja pelayanan Publik	30.	Indeks Pelayanan Publik	B	100	A	150,00
14.	Meningkatnya pengembangan Inovasi daerah dan pemanfaatan Teknologi Informasi	31.	Indek Inovasi Daerah	52,15	226,74	54,95	137,38
		32.	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik SPBE	1,06	68,83	1,06	58,89
15.	Meningkatnya penataan regulasi daerah	33.	Indeks kualitas kebijakan	-	-	NA	0,00

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD Tahun 2022

Target Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021– 2026 dengan rincian digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Target Kinerja dalam RPJMD (2021 – 2026)

1	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	% Capaian Target
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	1.	Laju pertumbuhan ekonomi	3,21	4,32	134,58
		2.	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	27,22	24,91	91,51
		3.	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	64,57	64,84	100,42
2.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	4.	Indeks kota layak huni	60	58,9	98,17
		5.	Indeks resiko bencana	137,62	151,43	89,97
		6.	Indeks kualitas Lingkungan hidup	74,26	69	92,92
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	7.	Indeks ketentraman dan ketertiban	100	100	100,00
4.	Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan.	8.	Persentase jalan yang berkeselamatan	2,74	2,45	89,42
		9.	Persentase layanan angkutan darat	19,51	14,17	72,63
		10.	Persentase luas Kawasan kumuh	0,55	0,50	109,09
		11.	Persentase rumah tidak layak huni.	10,85	1,59	185,35
5.	Meningkatnya kesesuaian ruang berbasis mitigasi bencana	12.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	80	81,56	101,95

6.	Meningkatnya ketangguhan kota	13.	Indeks ketangguhan Kota	400	460,2	115,05
7.	Meningkatnya kualitas Pendidikan	14.	Indeks pembangunan manusia	81,70	82,02	100,39
		15.	Harapan Lama Sekolah	16,50	16,36	99,15
		16.	Rata Rata Lama Sekolah	11,63	11,73	100,39
8.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	17.	Angka harapan hidup	71,40	71,2	99,72
		18.	Case Fatality Covid-19	1,75	0,39	177,71
9.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	19.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS yang diberdayakan.	60	88,78	147,97
		20.	Indeks Pembangunan Gender	98,05	98,09	100,04
		21.	Indeks Kota layak Anak	Pratama	Belum pratama	93,72
10.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	22.	Indeks Kerukunan umat Beragama	82,5	87,5	106,06
		23.	Indeks Aktualisasi Pancasila	68	77,95	114,63
		24.	Indeks pembangunan Kebudayaan	51,56	NA	0,00
11.	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Pemerintahan	25.	Indeks Reformasi Birokrasi	66	58,88	89,21
		26.	Opini BPK	WTP	WTP	100,00
		27.	Nilai Evaluasi AKIP	B	B	100,00
12.	Meningkatnya mutu Aparatur Sipil Negara	28.	Tingkat maturitas SPIP	LEVEL III	LEVEL III	100,00
		29.	Indeks profesionalitas ASN	71	47,71	67,20

13.	Meningkatnya kinerja pelayanan Publik	30.	Indeks Pelayanan Publik	C	A	150,00
14.	Meningkatnya pengembangan Inovasi daerah dan pemanfaatan Teknologi Informasi	31.	Indek Inovasi Daerah	40	54,95	137,38
		32.	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik SPBE	1,8	1,78	98,89
15.	Meningkatnya penataan regulasi daerah	33.	Indeks kualitas kebijakan	75	NA	0,00

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

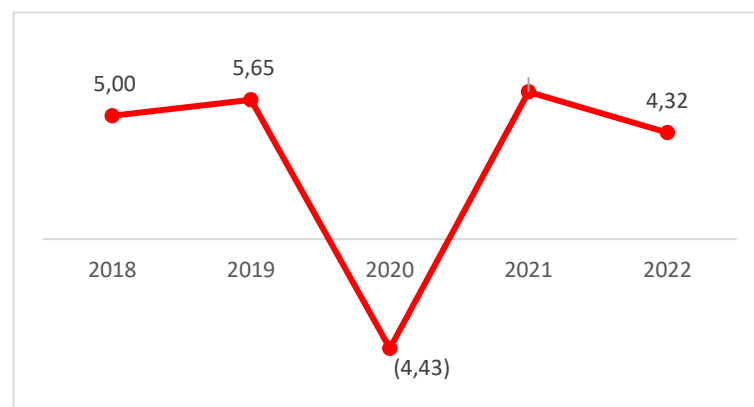
Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022 sebagaimana ditargetkan dalam RPMJD Tahun 2021-2026 dikategorikan tinggi. Hal ini disebabkan pada Tahun 2021 adanya kebijakan pelonggaran kegiatan usaha dan sosial dengan tetap mengikuti protokol penanganan Covid-19. Penyebaran Covid-19 sangat berdampak luas ke berbagai sektor di Kota Palu, dengan adanya kebijakan pelonggaran tersebut dapat meningkatkan realisasi dan capaian sasaran strategis Pemerintah Kota Palu. Adapun lima belas sasaran strategis pemerintah Kota Palu diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 yakni Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan indikator angka pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Palu mengalami kenaikan pada Tahun 2019 sebesar 0,65% dari Tahun 2018. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga pertumbuhan -4,43%. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif ke angka 5,97%. Tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kota Palu mengalami kontraksi dan hanya tumbuh pada angka 4,32%.

Gambar 3.1

Laju pertumbuhan PDRB Tahun 2022



Sumber : BPS Kota Palu, 2023

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor
Ekonomi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Laju pertumbuhan ekonomi	3,21	4,32	134,58	Sangat tinggi
2.	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	27,22	24,91	91,51	Sangat tinggi
3.	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	64,57	64,84	100,42	Sangat tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja				108,84	Sangat tinggi

Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2022 dengan indikator kinerja kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB sebesar 91,51% dan indikator kinerja kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB sebesar 100,42% dengan predikat capaian sangat tinggi, dengan demikian sasaran meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi dengan rata-rata capaian kinerja 108,84% memiliki predikat capaian sangat tinggi. Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB melebihi target rencana, hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Palu selama Tahun 2022 telah melakukan berbagai event seni dan olahraga yang berdampak pada bergeraknya roda perekonomian utamanya sektor jasa dan perdagangan.

Sasaran 2 yakni Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan menggunakan indikator indeks kota layak huni, indeks risiko bencana, dan indeks kualitas lingkungan hidup. Realisasi dan capaian ketiga indikator tersebut disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Indeks Kota Layak Huni	60	58,9	98,17	Sangat tinggi
2.	Indeks Risiko Bencana	137,62	151,43	89,97	Tinggi
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,26	69	92,92	Sangat tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja				93,68	Sangat tinggi

Capaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup

memiliki rata-rata capaian 93,68% dengan predikat sangat tinggi. Tiga indikator penyusunnya yaitu indeks kota layak huni capaian 98,17% predikat sangat tinggi, indeks risiko bencana capaian 89,97% predikat tinggi, dan indikator indeks kualitas lingkungan hidup capaian 92,92% predikat sangat tinggi.

Sasaran 3 yakni Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.

Sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan digambarkan dengan indeks ketentraman dan ketertiban, dimana realisasi dan capaiannya ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Indeks Ketentraman	100	100	100	Sangat tinggi

Berdasarkan Tabel 3.7, terlihat bahwa indeks ketentraman dan ketertiban dengan target 100% mendapatkan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap laporan gangguan keamanan dan ketertiban tertangani secara tuntas. Gerak cepat untuk penanganan laporan gangguan keamanan dan ketertiban melalui pembentukan Satgas Reaksi Cepat.

Sasaran 4 yakni Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Infrastruktur yang Berketahanan

Sasaran strategis meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan memiliki empat indikator kinerja yaitu persentase jalan yang berkeselamatan, persentase layanan angkutan darat, persentase luas kawasan kumuh, dan persentase rumah tidak layak huni. Realisasi dan capaian keempat indikator tersebut terlihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Infrastruktur yang berketahanan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Persentase jalan yang berkeselamatan	2,74	2,45	89,42	Tinggi
2.	Persentase layanan angkutan darat	19,51	14,17	72,63	Tinggi
3.	Persentase luas kawasan kumuh	0,55	0,50	109,09	Sangat tinggi
4.	Persentase rumah tidak layak huni.	10,85	1,59	185,35	Sangat tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja				114,12	Sangat Tinggi

Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan dapat dilihat dari Tabel 3.8, dimana indikator kinerja persentase jalan yang berkeselamatan dengan target 2,74 realisasi 69,29 predikat capaian sangat tinggi, persentase layanan angkutan darat dengan target 19,51 realisasi 14,17 predikat capaian tinggi, persentase luas kawasan kumuh dengan target 0,55 realisasi 0,5 predikat capaian sangat tinggi, dan persentase rumah tidak layak huni dengan target 10,85 realisasi 1,59 predikat capaian sangat tinggi. Secara keseluruhan rata-rata capaian indikator sasaran meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan sebesar 114,12 % atau kategori sangat tinggi.

Sasaran 5 yakni Meningkatnya Kesesuaian Ruang Berbasis Mitigasi Bencana

Sasaran strategis meningkatnya kesesuaian ruang berbasis mitigasi bencana dengan indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), realisasi dan capaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kesesuaian Ruang Berbasis Mitigasi Bencana

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	80	96,15	120,19	Sangat tinggi

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis miitigasi bencana dengan indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sangat berhasil dengan capaian 120,19%, dengan target luasan sebesar 28,559,440 ha atau sebesar 80% dari luas wilayah kota palu sebesar 35.699.300 ha dan realisasi luasan sebesar 34.324.877 ha atau sebesar 96,15%. Hasil tersebut berdasarkan evaluasi dan monitoring pengendalian pemanfaatan ruang yang tertuang dalam dokumen perencanaan pemanfaatan ruang. Keberhasilan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tataruang wilayah Kota Palu, disebabkan karena permohonan yang diajukan untuk pelaksanaan aktifitas kegiatan dan pembangunan telah sesuai dengan rencana tata ruang.

Sasaran 6 yakni Meningkatnya Ketangguhan Kota

Sasaran strategis meningkatnya ketangguhan kota ditunjukkan dengan indikator indeks ketangguhan kota, dimana capaiannya disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya ketangguhan kota

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Indeks Ketangguhan Kota	400	460,2	115,05	Sangat Tinggi

Perhitungan Indeks Ketangguhan Kota mengalami perubahan di Tahun 2022, dimana pada Tahun 2022 masih menggunakan metode indikator HFA (*Hyogo Framework For Action*) dengan menggunakan 10 langkah mendasar sehingga didapatkan angka absolut 263 poin dari poin tertinggi 590 untuk indeks ketangguhan Kota Palu tahun 2021, sedangkan dalam metode yang digunakan pada Tahun 2022 menggunakan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 dengan

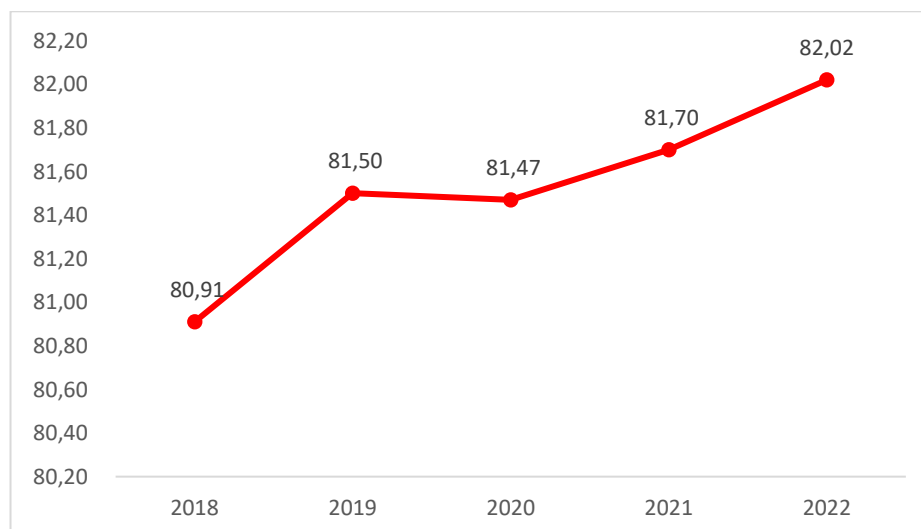
nilai Indeks Ketahanan Daerah berada pada rentang nilai 0-1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah :

- Indeks $\leq 0,4$ adalah rendah
- Indeks $0,4 - 0,8$ adalah sedang
- Indeks $0,8 - 1$ adalah tinggi

Hasil perhitungan Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2022 adalah 0,78 dimana masuk dalam kategori sedang. Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2022 kemudian dikonversi ke dalam angka sesuai perhitungan Tahun 2021 dengan mengalikan dengan poin tertinggi yaitu 590 sehingga diperoleh hasil 460,02. Realisasi ini menunjukkan capaian Indeks Ketangguhan Kota 115,05% dengan predikat sangat tinggi.

Sasaran 7 yakni Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Sasaran strategis meningkatnya kualitas Pendidikan mempunyai tiga indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah. Pada indikator indeks pembangunan manusia Pemerintah Kota Palu cenderung mengalami kenaikan sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2022. Adapun pencapaian indikator kinerja tersebut dapat lihat pada Gambar 3.2.

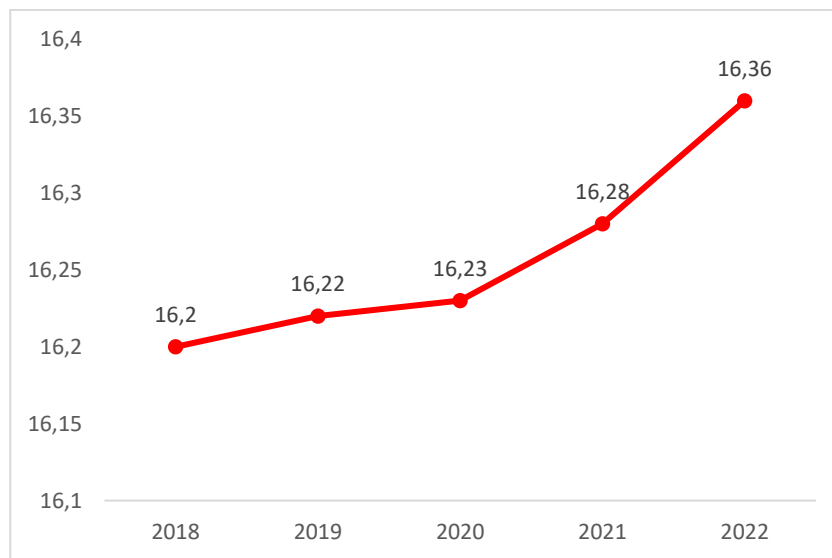


Gambar 3.2

Sumber : BPS Kota Palu, 2023

Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Harapan Lama Sekolah terus mengalami kenaikan dimana kenaikan tertinggi terjadi di Tahun 2022 yaitu 0,08 tahun dari Tahun 2021 sehingga menjadi 16,36 tahun seperti ditampilkan pada Gambar 3.3.

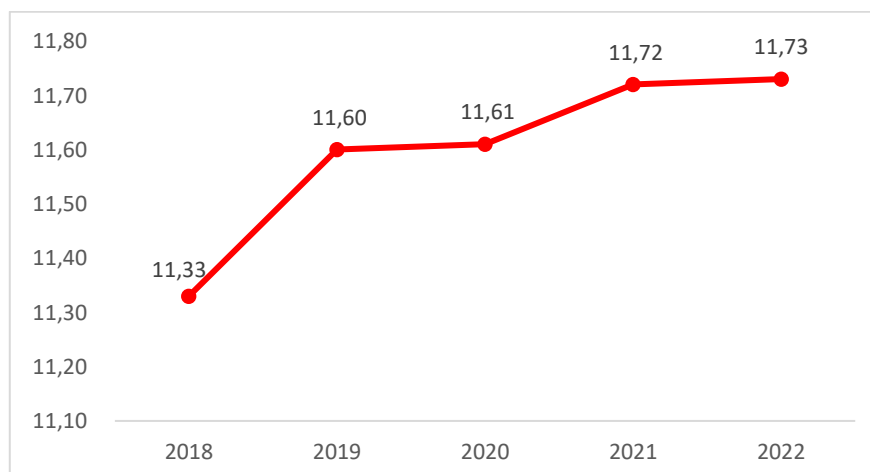


Sumber : BPS Kota Palu, 2023

Gambar 3.3

Harapan Lama Sekolah

Indikator Rata-rata Lama Sekolah secara konsisten terus mengalami kenaikan sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2022 seperti ditampilkan pada Gambar 3.4.



Sumber : BPS Kota Palu, 2023

Gambar 3.4

Rata-rata Lama Sekolah

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas Pendidikan yang diukur melalui tiga indikator terlihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Indeks pembangunan manusia	81,70	82,02	100,39	Sangat tinggi
2.	Harapan Lama Sekolah	16,50	16,36	99,15	Sangat tinggi
3.	Rata Rata Lama Sekolah	11,63	11,73	100,86	Sangat tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja				100,13	Sangat tinggi

Indeks pembangunan manusia pada Tahun 2022 terealisasi 82,02 dari target 81,70 sehingga capaiannya sebesar 100,13% predikat sangat tinggi, indikator Harapan Lama Sekolah Realisasi 16,36 tahun dari target 16,50 tahun sehingga capaian 99,15% predikat sangat tinggi, dan indikator Rata-rata Lama sekolah menunjukkan capaian 100,86% predikat sangat tinggi dimana realisasi 11,73 tahun lebih tinggi dari target 11,63 tahun. Hasil dari ketiga indikator ini menunjukkan meningkatnya kualitas Pendidikan di Kota Palu dengan rata-rata capaian kinerja 100,13% predikat sangat tinggi.

Sasaran 8 yakni Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur melalui indikator kinerja yaitu angka harapan hidup dan *case fatality covid-19* yang menggambarkan pelayanan kesehatan dan penanganan covid-19 di Kota Palu. Hasil evaluasi terhadap indikator ini ditunjukkan pada Tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12
Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Angka Harapan Hidup	71,40	71,2	99,72	Sangat tinggi
2.	<i>Case Fatality Covid-19</i>	1,75	0,39	177,71	Sangat tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja				138,72	Sangat tinggi

Berdasarkan Tabel 3.12 dapat dilihat bahwa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan rata-rata capaian kinerja 138,72% predikat sangat tinggi. Hal ini didukung oleh capaian angka harapan hidup sebesar 99,72% predikat sangat tinggi dan capaian *case fatality covid-19* sebesar 177,71% predikat sangat tinggi. Pencapaian ini tidak lepas dari peran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palu yang menerapkan berbagai program dan kegiatan terkait upaya pelayanan kesehatan dan penanganan covid-19 di Kota Palu, baik berskala nasional maupun daerah guna menunjang angka harapan hidup dan menurunkan *case fatality covid-19*. Upaya yang dilakukan diantaranya perbaikan gizi dan sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat yang terlaksana dengan baik. Selain itu juga telah ditopang dengan telah ditetapkannya Kota Palu sebagai pelayanan kesehatan universal (*Universal Health Coverage*).

Sasaran 9 yakni Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial

Sasaran strategis meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial diukur melalui indikator kinerja yaitu persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Kota Layak Anak di Kota Palu. Realisasi dan capaian ketiga indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS yang diberdayakan.	60	88,78	147,97	Sangat tinggi
2.	Indeks Pembangunan Gender	98,05	98,09	100,04	Sangat tinggi
3.	Indeks Kota Layak Anak	Pratama	Belum pratama	97,72	Sangat tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja				113,91	Sangat Tinggi

Capaian ketiga indikator dari sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial dapat dilihat dari indikator persentase

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan Realisasi sebesar 88,78 dari target 60 sehingga capaian 147,97 predikat sangat tinggi, indikator kedua indeks pembangunan gender realisasi 98,09 dari target 98,05 capaian 100,04 predikat sangat tinggi, dan indikator ketiga indeks kota layak huni belum memenuhi target untuk tingkat pratama karena masih ada 5 klaster pendukung penilaian indeks kota layak anak yang belum terpenuhi.

Sasaran 10 yakni Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan

Sasaran strategis meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan diukur melalui indikator kinerja yaitu indeks kerukunan umat beragama, indeks aktualisasi pancasila, dan indeks pembangunan kebudayaan di Kota Palu. Hasil evaluasi terhadap indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut ini:

Tabel 3.14
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Indeks Kerukunan umat Beragama	82,5	87,5	106,06	Sangat Tinggi
2.	Indeks Aktualisasi Pancasila	68	77,95	114,63	Sangat Tinggi
3.	Indeks pembangunan Kebudayaan	51,56	NA	0,00	-
Rata-rata Capaian Kinerja				73,56	sedang

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator kinerja indeks kerukunan beragama, pada Tahun 2022 realisasi pencapaian dengan Nilai 87,5 dari target nilai 82,5 dengan capaian 106,06% atau kategori sangat tinggi. Pencapaian kinerja indeks kerukunan beragama dari hasil pengukuran beberapa indikator yaitu (a) toleransi yang didalamnya ada saling pengertian, saling menerima, saling menghormati dan menghargai perbedaan sesama pemeluk agama; (b) kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas; (c) kerjasama dalam bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan; dan (d) potensi lokal, meliputi dukungan sumber daya lokal seperti ormas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh etnik, dan hukum adat dalam mendukung tercapainya kerukunan antar umat beragama. Hasil ini memberikan gambaran, bahwa masyarakat Kota Palu dapat menjaga kerukunan beragama tanpa membedakan ragam agama yang dianut.

Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan evaluasi terhadap indikator kinerja jumlah kebijakan Pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya, realisasi sejumlah 77,95 dari target 68 dengan capaian 114,64% kategori sangat tinggi, Pemerintah Kota Palu Bersama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI telah menandatangani nota kesepahaman tentang pembinaan ideologi Pancasila sejak tahun 2021.

Indeks pembangunan kebudayaan sebagai indikator terkait pengelolaan dan pengembangan kebudayaan di Kota Palu. Indikator ini belum dapat dihitung, namun sebagai upaya pengelolaan dan pengembangan kebudayaan telah dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah terkait.

Sasaran 11 yakni Meningkatnya akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Pemerintahan

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK, dan nilai evaluasi AKIP di Kota Palu. Hasil evaluasi terhadap indikator dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut ini:

Tabel 3.15
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	66	58,88	89,21	Tinggi
2.	Opini BPK	WTP	WTP	100	Sangat tinggi
3.	Nilai Evaluasi AKIP	B	B	100	Sangat tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja				96,40	Sangat Tinggi

Pencapaian indikator kinerja indeks reformasi birokrasi, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB adalah 58,88 dengan target 66 sehingga diperoleh capaian 89,21% predikat tinggi. Hasil evaluasi indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Palu di tahun 2022 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaiannya 100% predikat sangat tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap indikator Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan predikat B (Tahun 2022) dari target B atau capaian 100%.

Berbagai rekomendasi perbaikan AKIP dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti antara lain :

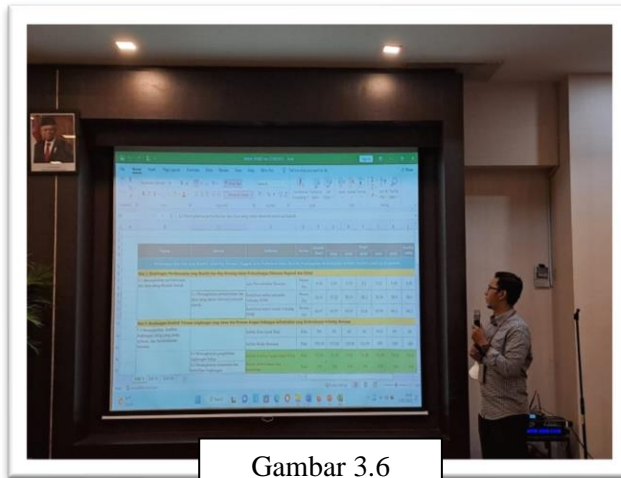
Melakukan perumusan kembali sasaran strategis pada level Pemerintah Daerah agar lebih mengutamakan kondisi kinerja yang menjawab isu strategis dan



Gambar 3.5

menggambarkan kondisi hasil/*outcome* pada level Pemerintah Daerah, namun perubahan tersebut diterapkan pada tahun 2023 sebagaimana *coaching* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Palu bersama tim evaluator Kementerian PAN-RB.



Gambar 3.6

Mendorong seluruh perangkat daerah untuk memastikan kinerja dan indikator kinerja di dalam dokumen perencanaan telah berorientasi pada hasil yang terukur, relevan, dan cukup serta menjawab isu strategis sebagaimana

coaching yang dilaksanakan oleh seluruh pimpinan perangkat daerah, namun diterapkan Tahun 2023.



Gambar 3.7

Melakukan penyempurnaan penyusunan penjabaran kinerja (*cascading*) berdasarkan kerangka berpikir logis (*logical framewok*) sehingga tercipta hubungan kausalitas antara kinerja berjenjang, serta dapat diselaraskan dengan proses bisnis organisasi dan penganggaran agar meningkatkan efektivitas

dan efisiensi kinerja organisasi.

Sasaran 12 yakni Meningkatnya Mutu Aparatur Sipil Negara

Sasaran strategis mutu aparatur sipil negara digambarkan oleh indikator tingkat maturitas SPIP dan indeks profesionalitas ASN. Hasil evaluasi terhadap indikator dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.16
Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Mutu Aparatur Sipil Negara

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Tingkat Maturitas SPIP	Level III	Level III	100	Sangat Tinggi
2.	Indeks Profesional ASN	71	47,71	67,20	Sedang
Rata-rata Capaian Kinerja				83,60	Tinggi

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya Mutu Aparatur Sipil Negara dengan dua indikator kinerja yakni tingkat maturitas SPIP hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan pencapaian target level III sehingga capaian 100% predikat sangat tinggi, untuk Indeks Profesional ASN hasil penilaian Badan Kepegawaian Negara dengan target 71, realisasi 47,71 menghasilkan capaian 67,20 dengan predikat sedang.

Sasaran 13 yakni Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

Sasaran strategis 13 ini merupakan upaya untuk mencapai misi keempat yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani. Meningkatnya kinerja pelayanan publik diukur dengan indikator indeks pelayanan publik yang realisasi dan capaiannya disajikan dalam Tabel 3.17.

Tabel 3.17
Capaian Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Indeks Pelayanan Publik	C	A	150	Sangat tinggi

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kinerja pelayanan publik dengan indikator kinerja indeks pelayanan publik adalah sangat tinggi dengan realisasi berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu A dari target Pemerintah Kota Palu yakni C.

Sasaran 14 yakni Meningkatnya Pengembangan Inovasi Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sasaran strategis 14 yaitu meningkatnya pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi dengan dua indikator yaitu indeks inovasi daerah dan nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tabel 3.18 menunjukkan tingkatan capaian kedua indikator tersebut.

Tabel 3.18
Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan Inovasi Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Indeks Inovasi Daerah	40	54,95	137,38	Sangat tinggi
2.	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE	1,8	1,78	98,89	Sangat tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja				98,13	Sangat tinggi

Pengukuran dan penilaian kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya Pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi dengan indikator kinerja indeks inovasi daerah dan nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan hasil pengukuran indeks inovasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri RI sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2022, dijelaskan bahwa indeks inovasi untuk kategori Kota se-Indonesia telah ditetapkan skor Indeks Inovasi Kota Palu sebesar 54,95 dengan predikat “Inovatif”. Pencapaian skor Indeks Inovasi Daerah tersebut diatas lebih tinggi dari target kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 40, sehingga angka capaian kinerja indeks inovasi daerah mencapai 137,38% dengan predikat sangat tinggi. Pencapaian target indeks inovasi daerah diperoleh berdasarkan representasi dari jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan oleh Perangkat Daerah lingkup Kota Palu selama kurun waktu dua tahun terakhir yang menjadi tolok ukur penilaian indeks inovasi daerah di Tahun 2022, baik dalam

bentuk inovasi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik. Diketahui bahwa jumlah usulan inovasi daerah Tahun 2022 sebanyak 23 usulan, 11 usulan diantaranya ditetapkan menjadi kebijakan inovasi daerah dengan status “penerapan” dan menjadi tolok ukur pengukuran indeks inovasi Kota Palu.

Indikator nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan hasil penilaian kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah 1,06, padahal Kota Palu menargetkan 1,8 sehingga capaiannya 58,89% dengan predikat sangat rendah. Hal ini masih belum mencapai harapan, sehingga dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak agar SPBE dapat berjalan secara sinergis dan kolaboratif serta tidak lagi bersifat parsial.

Sasaran 15 yakni Meningkatnya Penataan Regulasi Daerah

Sasaran strategis 15 meningkatnya Penataan Regulasi daerah belum dapat dilaksanakan pengukuran terhadap indikator kinerja Indeks Kualitas Kebijakan pada Tahun 2022.

Tabel 3.19
Capaian Sasaran Meningkatnya Penataan Regulasi Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Indeks Kualitas Kebijakan	75	NA	-	-

Meningkatnya penataan regulasi daerah dengan indikator kinerja indeks kualitas kebijakan belum dapat dilakukannya, namun upaya pencapaian sasaran meningkatnya penataan regulasi daerah telah dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah terutama oleh bagian hukum sekretariat daerah Kota Palu.

Berdasarkan capaian kelima belas sasaran Pembangunan Kota Palu, maka rata-rata capaian sasaran Tahun 2022 sebesar 101,76 % atau kategori sangat tinggi. Sementara pencapaian kinerja rata-rata indikator sasaran Tahun 2022 periode perencanaan 2021-2026 yakni sebesar 102,49 % (Sangat Tinggi).

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang dimaksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja Tahun 2022 dengan realisasi anggaran Tahun 2022 dengan rincian realisasi capaian target kinerja Tahun 2022 pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Perbandingan Target dan realisasi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian Target (%)	Target Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran 2022 (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	3,21	4,32	134,58	31.120.153.055	25.547.747.893	82,09
		Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	27,22	24,91	91,51	20.654.713.166	16.121.146.581	78,05
		Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	64,57	64,84	100,42	2.626.141.711	2.582.748.983	98,35
2.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks kota layak huni	60	58,9	98,17	79.518.282.960	73.260.400.683	92,13
		Indeks resiko bencana	137,62	151,43	89,97	54.014.116.105	53.701.292.844	99,42
		Indeks kualitas Lingkungan hidup	74,26	69	92,92	42.783.763.615	34.026.011.694	79,53
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks ketentraman dan ketertiban	100	100	100	15.323.387.077	1.636.941.975	10,68
4.		Persentase jalan yang berkeselamatan	2,7	2,45	89,42	130.590.455.391	120.810.751.554	92,51

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian Target (%)	Target Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran 2022 (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan.	Persentase layanan angkutan darat	19,51	14,17	72,63	3.649.244.275	3.309.849.023	90,70
		Persentase luas Kawasan kumuh	0,55	0,5	109,09	35.899.599.970	22.909.412.236	63,82
		Persentase rumah tidak layak huni.	10,85	1,59	185,35	51.503.818.440	48.934.680.215	95,01
5.	Meningkatnya kesesuaian ruang berbasis mitigasi bencana	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	80	96,15	120,19	70.665.773.559	55.720.555.132	78,85
6.	Meningkatnya ketangguhan kota	Indeks ketangguhan Kota	400	460,2	115,05	56.749.046.839	56.283.278.797	99,18
7.	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Indeks pembangunan manusia	81,7	82,02	100,39	20.101.906.600	17.641.213.101	87,76
		Harapan Lama Sekolah	16,5	16,36	99,15	681.470.000	670.674.780	98,42
		Rata Rata Lama Sekolah	11,63	11,73	100,86	95.610.797.814	90.954.164.513	95,13
8.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	71,4	71,2	99,72	99.858.130.411	77.381.358.810	77,49
		Case Fatality Covid-19	1,75	0,39	177,71	410.308.375	407.548.375	99,33
9.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS yang diberdayakan.	70	88,78	147,97	692.762.600	651.416.600	94,03

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian Target (%)	Target Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran 2022 (Rp)	Capaian Anggaran (%)
		Indeks Pembangunan Gender	98,05	98,09	100,04	1.890.434.500	1.731.916.383	91,61
		Indeks Kota layak Anak	Pratama	Belum Pratama	93,72	70.226.915.544	64.901.420.076	99,90
10.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks Kerukunan umat Beragama	82,5	87,5	106,06	19.641.757.850	17.314.400.893	88,15
		Indeks Aktualisasi Pancasila	68	77,95	114,63	3.226.563.500	3.168.305.182	98,19
		Indeks pembangunan Kebudayaan	51,56	NA	0	1.750.329.750	1.719.451.350	98,24
11.	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	66	58,88	89,21	256.010.000	248.160.000	96,93
		Opini BPK	WTP	WTP	100	96.747.732.745	95.247.624.159	98,45
		Nilai Evaluasi AKIP	B	B	100	3.442.221.160	3.189.335.525	92,65
12.	Meningkatnya mutu Aparatur Sipil Negara	Tingkat maturitas SPIP	Level III	Level III	100	131.899.800	124.814.750	94,63
		Indeks profesionalitas ASN	71	47,71	67,2	5.299.423.290	4.651.654.072	87,78
13.	Meningkatnya kinerja pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	C	A	150	87.690.653.951	66.429.169.068	75,75
14.	Meningkatnya pengembangan Inovasi daerah dan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indek Inovasi Daerah	40	54,95	137,38	1.715.421.125	1.650.815.657	96,23
		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik SPBE	1,8	1,06	58,89	5.397.421.250	4.723.503.823	87,51

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian Target (%)	Target Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran 2022 (Rp)	Capaian Anggaran (%)
15.	Meningkatnya penataan regulasi daerah	Indeks kualitas kebijakan	75	NA	0	18.211.472.100	15.909.296.718	87,36

Sumber : Bapedda Kota Palu Tahun 2022, diolah

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dengan membandingkan ketercapaian target indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Tabel di atas menunjukkan kinerja fisik sasaran daerah secara keseluruhan sudah tercapai 101,21 % dan untuk realisasi anggaran mencapai 87,97 %, artinya anggaran yang ada sudah digunakan secara optimal untuk mencapai target sasaran. Efisiensi anggaran tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Palu dalam penggunaan anggaran yang efektif dan berfokus pada outcome dan dampaknya terhadap pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Secara rinci efisiensi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.21
Efisiensi Anggaran Pencapaian Target Sasaran Strategis Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian Target (%)	Target Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran 2022 (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	3,21	4,32	134,58	31.120.153.055	25.547.747.893	17,91
		Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	27,22	24,91	91,51	20.654.713.166	16.121.146.581	-
		Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	64,57	64,84	100,42	2.626.141.711	2.582.748.983	-
2.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks kota layak huni	60	58,9	98,17	79.518.282.960	73.260.400.683	-
		Indeks resiko bencana	137,62	151,43	89,97	54.014.116.105	53.701.292.844	0,58
		Indeks kualitas Lingkungan hidup	74,26	69	92,92	42.783.763.615	34.026.011.694	-
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks ketentraman dan ketertiban	100	100	100	15.323.387.077	1.636.941.975	89,32
4.	Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan.	Persentase jalan yang berkeselamatan	2,7	2,45	89,42	130.590.455.391	120.810.751.554	-
		Persentase layanan angkutan darat	19,51	14,17	72,63	3.649.244.275	3.309.849.023	-
		Persentase luas Kawasan kumuh	0,55	0,5	109,09	35.899.599.970	22.909.412.236	36,18

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian Target (%)	Target Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran 2022 (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
		Persentase rumah tidak layak huni.	10,85	1,59	185,35	51.503.818.440	48.934.680.215	4,99
5.	Meningkatnya kesesuaian ruang berbasis mitigasi bencana	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	80	96,15	120,19	70.665.773.559	55.720.555.132	-
6.	Meningkatnya ketangguhan kota	Indeks ketangguhan Kota	400	460,2	115,05	56.749.046.839	56.283.278.797	0,82
7.	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Indeks pembangunan manusia	81,7	82,02	100,39	20.101.906.600	17.641.213.101	12,24
		Harapan Lama Sekolah	16,5	16,36	99,15	681.470.000	670.674.780	1,58
		Rata Rata Lama Sekolah	11,63	11,73	100,86	95.610.797.814	90.954.164.513	4,87
8.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	71,4	71,2	99,72	99.858.130.411	77.381.358.810	22,51
		Case Fatality Covid-19	1,75	0,39	177,71	410.308.375	407.548.375	0,67
9.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS yang diberdayakan.	70	88,78	147,97	692.762.600	651.416.600	5,97
		Indeks Pembangunan Gender	98,05	98,09	100,04	1.890.434.500	1.731.916.383	8,39
		Indeks Kota layak Anak	Pratama	Belum Pratama	93,72	9.448.831.185	9.439.533.730	0,10
10.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai	Indeks Kerukunan umat Beragama	82,5	87,5	106,06	19.641.757.850	17.314.400.893	11,85

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian Target (%)	Target Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran 2022 (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
	keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila	68	77,95	114,63	3.226.563.500	3.168.305.182	1,81
		Indeks pembangunan Kebudayaan	51,56	NA	0	1.750.329.750	1.719.451.350	-
11.	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	66	58,88	89,21	256.010.000	248.160.000	-
		Opini BPK	WTP	WTP	100	96.747.732.745	95.247.624.159	1,55
		Nilai Evaluasi AKIP	B	B	100	3.442.221.160	3.189.335.525	7,35
12.	Meningkatnya mutu Aparatur Sipil Negara	Tingkat maturitas SPIP	Level III	Level III	100	131.899.800	124.814.750	5,37
		Indeks profesionalitas ASN	71	47,71	67,2	5.299.423.290	4.651.654.072	-
13.	Meningkatnya kinerja pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	C	A	150	87.690.653.951	66.429.169.068	24,25
14.	Meningkatnya pengembangan Inovasi daerah dan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indek Inovasi Daerah	40	54,95	137,38	1.715.421.125	1.650.815.657	-
		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik SPBE	1,8	1,06	58,89	5.397.421.250	4.723.503.823	-
15.	Meningkatnya penataan regulasi daerah	Indeks kualitas kebijakan	75	NA	0	18.211.472.100	15.909.296.718	-

Selanjutnya, program yang mendukung pencapaian indikator sasaran Tahun 2022 diuraikan dalam Tabel 3.22 di bawah ini :

Tabel 3.22
Program dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	REALISASI
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi		25.547.747.893
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	157.952.847
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	333.967.950
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	122.373.235
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	107.384.300
		Program Pelayanan Penanaman Modal	85.738.825
		Program Promosi Penanaman Modal	48.555.000
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	429.972.380
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	146.344.500
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	110.522.500
		Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	429.972.380
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.032.188.200
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	426.505.490
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	15.909.296.718
		Program Perekonomian dan Pembangunan	3.690.405.163
		Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.249.341.120
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	493.688.750
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	385.123.660
		Program Penyuluhan Pertanian	388.414.875

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	REALISASI
2	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB		16.121.146.581
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	3.164.745.225
		Program Pengembangan UMKM	1.412.248.600
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.273.376.369
		Program pengelolaan perikanan Budidaya	873.014.430
		Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	51.622.850
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	41.662.500
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.365.507.112
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.889.567.720
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	39.151.775
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	10.250.000
3	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB		2.582.748.983
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	515.600.000
		Program Pemasaran Pariwisata	533.615.560
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.533.533.423
4	Indeks Kota Layak Huni		73.260.400.683

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	REALISASI
		Program penyelenggaraan penataan ruang	388.996.225
		Program Pengembangan Perumahan	2.300.234.150
		Program Kawasan Permukiman	11.372.215.593
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	-
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	59.198.954.715
5	Indeks Resiko Bencana		53.701.292.844
		Program Penanggulangan Bencana	52.324.390.344
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.376.902.500
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		34.026.011.694
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	847.765.100
		Program Pengelolaan Persampahan	23.864.427.507
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.466.128.796
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	7.240.667.153
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	607.023.138
7	Indeks Ketentraman dan Ketertiban		1.636.941.975

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	REALISASI
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.376.902.500
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	260.039.475
8	Persentase Jalan yang Berkeselamatan		120.810.751.554
		Program Penyelenggaraan Jalan	120.810.751.554
9	Persentase Layanan Angkutan Darat		3.309.849.023
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.309.849.023
10	Persentase Luas Kawasan Kumuh		22.909.412.236
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	131.870.349
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	8.560.937.139
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.836.357.905
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.031.250
		Program Kawasan Permukiman	11.372.215.593
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
11	Persentase Rumah tidak Layak Huni		48.934.680.215
		Program Penataan Bangunan Gedung	46.593.681.340
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	40.764.725

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	REALISASI
		Program Pengembangan Perumahan	2.300.234.150
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
12	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW		55.720.555.132
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.031.250
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	8.560.937.139
		Program Penataan Bangunan Gedung	46.593.681.340
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
		Program Penyelenggaraan Jalan	
		Program penyelenggaraan penataan ruang	388.996.225
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	19.868.875
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	13.290.400
		Program Penatagunaan Tanah	135.749.620
13	Indeks Ketangguhan Kota		56.283.278.797
		Program penyelenggaraan penataan ruang	388.996.225
		Program Penanggulangan Bencana	52.324.390.344
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.376.902.500
		Program Penanganan Bencana	1.338.639.618

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	REALISASI
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	634.848.730
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	205.396.880
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	14.104.500
14	Indeks Pembangunan Manusia		17.641.213.101
		Program Rehabilitasi Sosial	1.731.916.383
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	15.909.296.718
15	Harapan Lama Sekolah		670.674.780
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	670.674.780
16	Rata-rata Lama Sekolah		90.954.164.513
		Program Pengelolaan Pendidikan	90.954.164.513
17	Angka Harapan Hidup		77.381.358.810
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	58.278.432.186
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	199.349.511
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.396.931.925
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.276.685.974
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	9.439.533.730

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	REALISASI
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	205.396.880
		Program Pengendalian Penduduk	61.415.134
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.029.207.470
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.494.406.000
			G
18	Case Fatality Rate Covid-19		407.548.375
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	407.548.375
19	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan		651.416.600
		Program Pemberdayaan Sosial	619.452.600
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	31.964.000
20	Indeks Pembangunan Gender		1.731.916.383
		Program Rehabilitasi Sosial	1.731.916.383
21	Indeks Kota Layak Anak		64.901.420.076
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	9.439.533.730
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	157.952.847
		Program Penempatan Tenaga Kerja	16.355.000
		Program Hubungan Industrial	167.264.725

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	REALISASI
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	204.046.456
		Program Perlindungan Perempuan	109.794.255
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	109.794.255
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	23.133.000
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	163.599.449
		Program Perlindungan Khusus Anak	44.579.143
		Program Pengembangan UMKM	1.412.248.600
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	3.164.745.225
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.471.642.602
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	12.029.487.370
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	36.387.243.419
22	Indeks kerukunan umat beragama		17.314.400.893
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	22.358.950
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	15.909.296.718
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.382.745.225
23	Indeks Aktualisasi Pancasila		3.168.305.182
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.364.124.115

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	REALISASI
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	804.181.067
24	Indeks pembangunan kebudayaan		1.719.451.350
		Program Pengembangan Kebudayaan	317.656.325
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	300.232.925
		Program Pembinaan Sejarah	18.645.000
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	181.272.150
		Program Pembinaan Perpustakaan	190.634.750
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	11.917.700
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	699.092.500
25	Indeks Reformasi		248.160.000
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	248.160.000
26	Opini BPK		95.247.624.159
		Program Pengelolaan Keuangan	89.345.078.521
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.653.999.552
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.444.727.994
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.803.818.092

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	REALISASI
27	Nilai Evaluasi AKIP		3.189.335.525
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.189.335.525
28	Tingkat Maturitas SPIP		124.814.750
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	124.814.750
		Program Pengelolaan Arsip	157.607.880
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	11.032.100
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	3.450.000
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	19.767.903.099
		Program Perekonomian dan Pembangunan	3.690.405.163
29	Indeks Profesionalitas ASN		4.651.654.072
		Program Kepegawaian Daerah	1.881.599.688
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.770.054.384
30	Indeks Pelayanan Publik		66.429.169.068
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	58.278.432.186
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	96.333.200
		Program Pendaftaran Penduduk	1.443.257.225
		Program Pencatatan Sipil	164.843.200

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	REALISASI
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	67.858.610
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	12.000.000
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	110.522.500
		Program Pelayanan Penanaman Modal	85.738.825
		Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	1.074.435
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	146.344.500
		Program Perizinan Usaha Pertanian	24.194.760
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	41.662.500
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.365.507.112
		Program Standardisasi Perlindungan Konsumen	426.505.490
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	39.151.775
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	125.742.750
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
31	Indeks Inovasi Daerah		1.650.815.657
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.650.815.657
32	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		4.723.503.823
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	333.967.950
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.962.031.427
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	136.649.320
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	280.605.126
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	10.250.000

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	REALISASI
33	Indeks Kualitas Kebijakan		15.909.296.718
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	15.909.296.718

3.2. Realisasi Anggaran

Berpedoman pada indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 diarahkan kepada :

1. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah melalui ekstensifikasi;
2. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari sisi belanja dengan pendekatan money follow program berbasis *outcome*;
4. Meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; dan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.304.695.508.265,00 dengan rincian sebagai Berikut:

1. Pendapatan

Berdasarkan APBD Kota Palu Tahun 2022 pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada adanya peningkatan pendapatan melalui intensifikasi yang berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada Tahun 2022 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.321.873.346.552,65. Adapun laporan realisasi pendapatan sebagai berikut :

Tabel 3.22

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2022

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
PAD	269.724.388.611,00	297.221.722.945,47	110,19
Pendapatan Transfer	1.001.407.557.941,65	1.044.210.951.871,00	104,27
Lain-lain Pendapatan yang Sah	50.741.400.000,00	48.958.910.037,00	96,49
Total	1.321.873.346.552,65	1.390.391.584.853,47	105,18

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu, Tahun 2022

Tabel 3.22 menguraikan capaian PAD melebihi target dari yang ditetapkan yakni sebesar Rp.269.724.388.611,00. Realisasi PAD sebesar Rp. 297.221.722.945,47 atau sebesar 110,19%. Realisasi pendapatan transfer Tahun 2022 sebesar Rp. 1.044.210.951.871,00 atau mencapai 104,27% dari target yang direncanakan. Untuk realisasi lain-lain pendapatan yang sah hanya terealisasi sebesar Rp. 48.958.910.037,00 atau terealisasi 96,49 %.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan pendekatan program dan kegiatan berbasis *outcome*. Hal ini dilakukan untuk mencapai visi misi pemerintah daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Kebijakan Belanja daerah secara deskriptif dapat dituangkan ke dalam Tabel 3.23 :

Tabel 3.23
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2022

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN REALISASI		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
	1	2	3	4
1	Belanja Operasi	1.288.219.098.461,00	1.218.431.685.171,69	94,58
2	Belanja Modal	329.789.230.305,00	289.914.401.250,00	87,91
3	Belanja Tak terduga	85.670.000.000,00	84.897.047.923,00	99,10
	Total Belanja	1.703.978.328.766,00	1.593.543.134.344,69	93,51

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3.23 di atas, diuraikan bahwa belanja Tahun 2022 sebesar Rp. 1.703.978.328.766,00 yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp. 1.288.219.098.461,00, belanja modal sebesar Rp. 329.789.230.305,00, dan belanja tak terduga sebesar Rp. 85.670.000.000,00. Sementara untuk realisasi belanja sebesar Rp.1.593.543.134.344,69 atau 93,51% yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp. 1.218.431.685.171,69, belanja modal sebesar Rp. 289.914.401.250,00, dan belanja tak terduga sebesar Rp. 84.897.047.923,00.

3. Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2022 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.xx berikut ini :

Tabel 3.24
Pembiayaan Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2022

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022 SETELAH PERUBAHAN		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Penerimaan Daerah	383.104.982.213,00	383.034.982.213,17	99,982
2	Pengeluaran Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	382.104.982.213,00	383.034.982.213,17	100,243

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3.24 di atas penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 383.104.982.213,00 terealisasi sebesar Rp. 383.034.982.213,17 atau 99,982% dan pengeluaran pembiayaan daerah yang ditargetkan besar Rp. 1.000.000.000,00,-, namun tidak terealisasi.

3.3 Inovasi Pemerintah Kota Palu

Berdasarkan hasil pengukuran indeks inovasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri RI sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri No. 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-indonesia telah ditetapkan skor Indeks Inovasi Kota Palu sebesar 54,95 dengan predikat “Inovatif”.

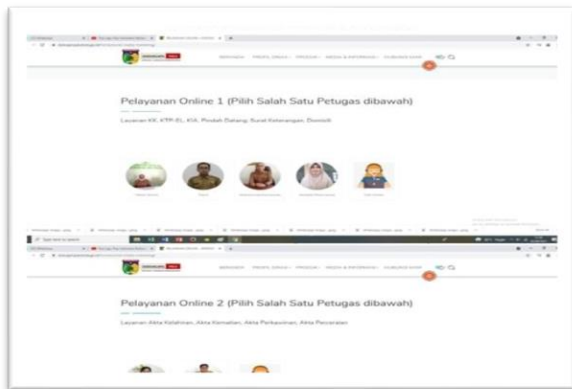
Pencapaian skor Indeks Inovasi Daerah tersebut di atas lebih tinggi dari target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 40 sehingga angka capaian kinerja sasaran strategis mencapai 137,38 % dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian sasaran strategis diatas diperoleh berdasarkan representasi dari jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan oleh perangkat daerah lingkup Kota Palu selama kurun waktu dua tahun terakhir yang menjadi tolak ukur penilaian indeks inovasi trata Kelola pemerintahan maupun pelayanan publik yang jumlah usulan inovasi daerah sebanyak 23 usulan, 11 usulan diantaranya ditetapkan menjadi kebijakan inovasi daerah dengan status penerapan dan menjadi tolak ukur pengukuran indeks Kota Palu meliputi :

1. SIMALEO BERGERAK (SISTEM MOBILE DOKUMEN

SIMALEO BERGERAK merupakan akronim dari *system mobile* dokumen kependudukan bersih, gratis, dan praktis. Dokumen kependudukan merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat baik anak-anak sampai dengan para orang tua tanpa harus membedakan gender. Sulitnya mengakses loket pelayanan kependudukan yang hanya berada di pusat kota menjadi kendala bagi kaum Wanita dan kelompok rentan lainnya khususnya yang berada di wilayah pegunungan.



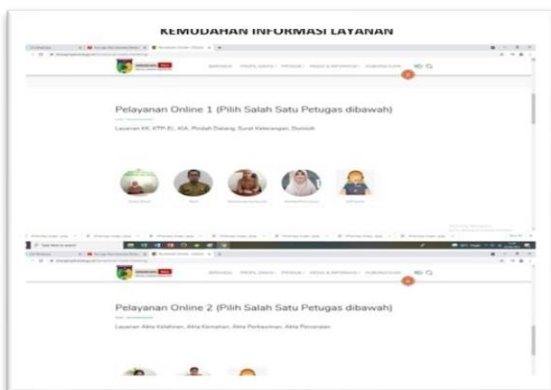
2. PELAYAN SEKSI



PELAYAN SEKSI Merupakan pelayanan khusus petugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi para kelompok rentan yaitu disabilitas, orang sakit dan lansia yang memiliki keterbatasan dan kesulitan untuk mendapat akses atas pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, inovasi ini memberikan kemudahan bagi kelompok

seksi berupa loket khusus di kantor tanpa antrian dan berkas persyaratannya serta menempatkan petugas khusus mobile di lapangan bagi kelompok seksi yang tidak dapat datang langsung ke kantor.

3. PELANGI KECAMATAN



PELANGI KECAMATAN merupakan Inovasi Pelayanan MORAMBANG KITA MARISI, ini dilakukan agar masyarakat diberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban serta pemenuhan hak didalam kepemilikan dokumen kependudukan.

4. ALPUKAT



ALPUKAT merupakan inovasi pelayanan yang bertujuan sebagai percepatan peningkatan akta lahir bagi anak. Inovasi ini, mempermudah masyarakat yang melaksanakan pelayanan di RS bersalin maupun puskesmas-puskesmas.

5. KALEDO GRATIS



Inovasi Kaledo merupakan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, mengembangkan ide terkait percepatan pelayanan bagi anak usia sekolah layanan yang bersifat mobile langsung ke sekolah sekolah baik Paud/TK SD SLTP/SMP, SMU/SLTA yang melayani anak sekolah khusus penerbitan Akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak bagi anak dibawa 17 tahun.

6. LASANDI



LASANDI merupakan Inovasi pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental orang dengan gangguan jiwa yang terlantar.

7. Rumah Singgah Nompelei Ntodea



Rumah Singgah Nompelei Ntodea merupakan rumah yang diperuntukkan bagi layanan terhadap gepeng, anak jalanan, anak terlantar, lansia terlantar, dan penyandang disabilitas. Program ini menindaklanjuti keluhan masyarakat mayangkut maraknya gelandang dan pengemis (Gepeng), di Kota Palu.

8. SATGAS PANCASILA



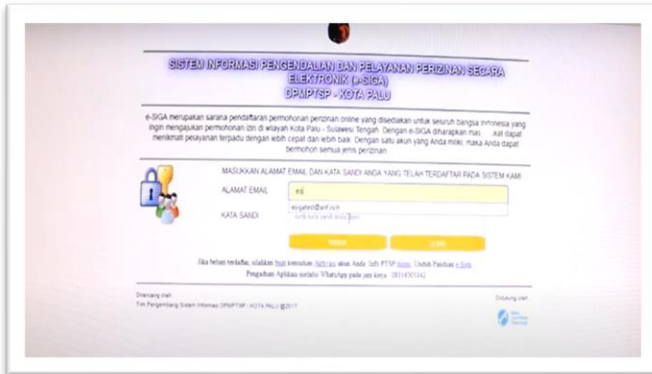
SATGAS PANCASILA Program Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan yang merupakan Program Kerja Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu. Program ini bertujuan untuk ditumbuhkan kembali yaitu nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotongroyongan.

9. Layanan Kasihku Bergerak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.

Layanan ini khusus dibuka di seluruh kantor kelurahan. Dalam hal ini seluruh kelurahan bisa melayani permohonan administrasi kependudukan untuk kemudian diajukan ke Dinas Dukcapil.

10. E-Siga secara elektronik berbasis online Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Kota Palu.

Aplikasi berbasis Online ini didesain Khusus untuk mempermudah Pelayanan Pengurusan Izin oleh Masyarakat, dengan hanya mempergunakan Android atau perangkat IT yang telah dilengkapi tehnologi



Internet maka pengurusan izin tidak lagi harus mengantri dan memakan waktu lama serta mengurangi Resiko Percaloan dan bahaya Pungli dan Gratifikasi.

Badan pelayanan perizinan terpadu melakukan inovasi pelayanan dengan membangun sistem pelayanan perizinan dimana sistem ini sangat mempermudah pelayanan dan proses awal permohonan sampai penyerahan izin dapat terintegrasi pada tracking sistem yang lebih efektif dan efisien dalam memudahkan percepatan perizinan.

11. Forum Libu ntodea Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Palu



Libu Ntodea berfungsi membantu Pemerintah Kota Palu dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian isu strategis yang berkembang di masyarakat.

Musyawarah mufakat (libu ntodea) sangat dibutuhkan dalam masyarakat untuk menjaga kerukunan hidup bersama. Musyawarah mufakat dilaksanakan di tempat pertemuan disebut baruga/bantaya. Kehadiran Libu Todea diharapkan dapat sebagai kanalisasi setiap permasalahan untuk selanjutnya dapat dicarikan solusi secara langsung dan bersama, oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan akademisi.

12. Musrenbang Inklusif Kota Palu oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Palu.



Kegiatan yang digagas oleh Bappeda Kota Palu, dengan melibatkan kelompok masyarakat rentan dalam perencanaan pembangunan. Agar perencanaan pembangunan daerah dapat benar-benar sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan nyata masyarakat yang memerlukan penanganan secara khusus *bagi warga masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik bawaan, penyakit yang diderita, serta pekerjaan*

yang oleh sebagian masyarakat dipandang sebelah mata.



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Palu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap capaian kinerja (*performance results*) Pemerintah Kota Palu Tahun 2022 menggambarkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Palu selama Tahun 2022 sangat tinggi. Hasil ini menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2021-2026.

Sasaran strategis Pemerintah Kota Palu sebanyak 15 (lima belas) sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Target yang digunakan sebagai dasar pengukuran mencakup 33 indikator kinerja sasaran. Capaian dari sembilan target sasaran yang meliputi 19 indikator kinerja sasaran di atas 100 %. Capaian ini termasuk dalam kategori kinerja sangat tinggi. Dua indikator belum dapat diukur yakni indikator Indeks pembangunan kebudayaan dan indeks kualitas kebijakan. Kedua indikator tersebut tidak dilakukan pengukuran secara mandiri karena menunggu pengukuran secara independen oleh lembaga/ kementerian teknis terkait. Secara keseluruhan indikator kinerja sasaran tercapai dengan rata-rata capaian sebesar 102,49 atau kategori sangat tinggi.

Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Palu didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja dalam APBD Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.703.978.328.766,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.593.543.134.344,69 atau 93,1%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah diperjanjikan. Implementasi perencanaan anggaran yang berbasis keluaran menjadi kunci utama dalam pencapaian target kinerja serta mendukung efektivitas dan efisiensi anggaran. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2022 disusun dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Palu di masa yang akan datang.



PEMERINTAH
KOTA PALU

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KOTA PALU TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. HADIANTO RASYID, S.E**

Jabatan : **Wali Kota Palu**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 15 Maret 2022

WALI KOTA PALU

H. HADIANTO RASYID, S.E

Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	1.	Laju pertumbuhan ekonomi	3,21
		2.	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	27,22
		3.	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	64,57
2.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	4.	Indeks kota layak huni	60
		5.	Indeks resiko bencana	137,62
		6.	Indeks kualitas Lingkungan hidup	74,26
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	7.	Indeks ketentraman dan ketertiban	100
4.	Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan.	8.	Persentase jalan yang berkeselamatan	2,74
		9.	Persentase layanan angkutan darat	19,51
		10.	Persentase luas Kawasan kumuh	0,55
		11.	Persentase rumah tidak layak huni.	10,85
5.	Meningkatnya kesesuaian ruang berbasis mitigasi bencana	12.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	80
6.	Meningkatnya ketangguhan kota	13.	Indeks ketangguhan Kota	400
7.	Meningkatnya kualitas Pendidikan	14.	Indeks pembangunan manusia	81,70
		15.	Harapan Lama Sekolah	16,50
		16.	Rata Rata Lama Sekolah	11,63
8.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	17.	Angka harapan hidup	71,40
		18.	Case Fatality Covid-19	1,75
9.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	19.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS yang diberdayakan.	60
		20.	Indeks Pembangunan Gender	98,05
		21.	Indeks Kota layak Anak	Pratama
10.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai	22.	Indeks Kerukunan umat Beragama	82,5
		23.	Indeks Aktualisasi Pancasila	68

	keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan			
		24.	Indeks pembangunan Kebudayaan	51,56
11.	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Pemerintahan	25.	Indeks Reformasi Birokrasi	66
		26.	Opini BPK	WTP
		27.	Nilai Evaluasi AKIP	B
12.	Meningkatnya mutu Aparatur Sipil Negara	28.	Tingkat maturitas SPIP	LEVEL III
		29.	Indeks profesionalitas ASN	71
13.	Meningkatnya kinerja pelayanan Publik	30.	Indeks Pelayanan Publik	C
14.	Meningkatnya pengembangan Inovasi daerah dan pemanfaatan Teknologi Informasi	31.	Indek Inovasi Daerah	40
		32.	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik SPBE	1,8
15.	Meningkatnya penataan regulasi daerah	33.	Indeks kualitas kebijakan	75



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR : 800/116/ORGANISASI /2022**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALU
TAHUN 2021-2026**

WALI KOTA PALU,

- | | | |
|-----------|---|---|
| Menimbang | : | <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka pengukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Palu dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2021- 2026. |
| Mengingat | : | <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); |

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1981);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
13. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 11);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021-2026.**
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palu.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal, 15 Maret 2022

WALI KOTA PALU,



HADIANTO RASYID

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Formula	OPD
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	1.	Laju pertumbuhan ekonomi	$R = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100$	Dinas Koperasi, UMKM Dan Tenaga Kerja Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
		2.	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	Jumlah PDRB Sektor Sekunder dibagi PDRB x 100.	Dinas Koperasi, UMKM Dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sekretariat Daerah Kota Palu
		3.	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	Jumlah PDRB Sektor Tersier dibagi PDRB x 100	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika.
2.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	4.	Indeks kota layak huni	Publikasi Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP)	Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		5.	Indeks resiko bencana	Publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		6.	Indeks kualitas Lingkungan hidup	IKLH = (30% x Indeks Kualitas Air + 30% x Indeks Kualitas Udara + 40% x Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	7.	Indeks ketentraman dan ketertiban	Publikasi Kepolisian RI	Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesbangpol
4.	Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan.	8.	Persentase jalan yang berkeselamatan	Panjang jalan yang memenuhi standar keselamatan dibagi panjang jalan kota di kali 100	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup
		9.	Persentase layanan angkutan darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum




		10.	Persentase luas Kawasan Kumuh.	$\text{Nilai Rerang (NR)} = \frac{[\sum \text{Nilai Tertinggi} - \sum \text{Nilai Terendah}]}{3}$ <p>4. Kategori kumuh berat pada nilai = 55-75 5. Kategori kumuh sedang pada nilai = 35-54 6. Kategori kumuh ringan pada nilai = 15-34.</p>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		11.	Persentase rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah layak huni dikali 100.	Dinas Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum
5.	Meningkatnya kesesuaian ruang berbasis mitigasi bencana	12.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Perbandingan antara Pemanfaatan (penggunaan) lahan eksisting dengan rencana tata ruang wilayah dikali 100	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Meningkatnya ketangguhan kota	13.	Indeks ketangguhan Kota	Formula Dissaster Resilience Assesment (United Nations Office for Disaster Risk Reduction)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.	Meningkatnya kualitas Pendidikan	14.	Indeks pembangunan manusia	$IPM = \sqrt[3]{\sqrt{\text{keselamatan}} \times \sqrt{\text{pendidikan}} \times \sqrt{\text{pengeluaran}}} \times 100$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas
		15.	Harapan Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana: RLS = harapan lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i yang berumur 25 tahun n = jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		16.	Rata Rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	17.	Angka harapan hidup	Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umurseseorang yang diharapkan dapat terus hidup (Publikasi BPS).	Dinas Kesehatan RSU Anutapura
		18.	Case Fatality Covid-19	$CFR = \frac{\text{Jumlah kematian Akibat penyakit dalam periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah penyakit yang terdiagnosa dalam periode waktu yang sama}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan RSU Anutapura
9.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	19.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan.	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terberdayakan dibagi Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dikali 100.	Dinas Sosial Kecamatan
		20.	Indeks Pembangunan Gender	IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki	Dinas Perhubungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		21.	Indeks Kota layak Anak	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten / Kota Layak Anak}}{\text{Jumlah Kabupaten / Kota di Provinsi}} \times 100\%$	DP3A
10.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	22.	Indeks Kerukunan umat Beragama	Hasil penilaian Kementerian Agama Republik Indonesia	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dan Kesejahteraan



10.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	22.	Indeks Kerukunan umat Beragama	Hasil penilaian Kementerian Agama Republik Indonesia	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah
		23.	Indeks Aktualisasi Pancasila	$IAP = \sum_{i=1}^n (W_i \times SX_i)$ <p>IAP : Indeks Aktualisasi Pancasila Wj : Bobot indikator ke-i SXj : nilai indikator ke-i yang telah dinormalisasi</p>	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		24.	Indeks pembangunan kebudayaan	$Indeks D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \cdot 100$ <ul style="list-style-type: none"> - SXji adalah nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi - nj adalah banyaknya indikator dimensi ke- - Dj adalah indeks dimensi ke-j $IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \cdot Indeks D_j)$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IPK adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan - Dj adalah Dimensi ke-j - Wj adalah Bobot Dimensi ke-j 	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja	25.	Indeks Reformasi Birokrasi	Publikasi Hasil Penilaian Kemenpan-RB.	Sekretariat Daerah dan Seluruh OPD

15.	Meningkatnya penataan regulasi daerah	33.	Indeks kualitas kebijakan	Formula sesuai surat edaran Kepala LAN RI Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan	Sekretariat Daerah
-----	---------------------------------------	-----	---------------------------	--	--------------------

PIAGAM PENGHARGAAN PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2022

No.	Dokumen Penghargaan	Jenis Penghargaan	Narasi
1.		<p style="text-align: center;">Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022</p>	<p>erintah Kota Palu menerima opini zona hijau pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Opini ini merupakan cerminan adanya perbaikan pelayanan publik di Kota Palu.</p>
2.		<p style="text-align: center;">Nilai SAKIP B (Kategori Baik)</p>	<p>Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Palu Tahun 2022 mendapatkan predikat baik atau Nilai SAKIP B. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah</p>
3.		<p style="text-align: center;">Penghargaan Opini Laporan Keuangan</p>	<p>Hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 yang dilaksanakan pada Tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menempatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</p>

No.	Dokumen Penghargaan	Jenis Penghargaan	Narasi
4.	 <p>The image shows a commemorative plaque (plagam) for the 2022 Provincial Development Award (Penghargaan Pembangunan Daerah 2022) for Kota Palu. The plaque is framed in gold and contains the following text: 'MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/REPUBLIK INDONESIA', 'Plagam Penghargaan Pembangunan Daerah 2022', 'Nomor: KEP. 14 /M.PPN/HK/GA/2022', 'Dibarkan kepada:', 'Kota Palu', and 'sebagai 10 Daerah terbaik dengan kategori Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat II dalam penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah 2022'. It also includes the date 'Jakarta, 15 April 2022' and the signature of the Minister of National Development Planning.</p>	<p>Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Nasional</p>	<p>Setiap tahun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia melakukan penilaian atas Perencanaan Pembangunan Daerah. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan kegiatan pengendalian perencanaan pembangunan Daerah. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan kegiatan pengendalian perencanaan pembangunan daerah oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui evaluasi kreatif dan komprehensif terhadap pembangunan daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil dengan baik dalam perencanaan, pencapaian pelaksanaan, dan inovasi pembangunan. Kegiatan PPD ini sebelumnya dikenal dengan nama Anugerah Pangripta Nusantara (APN), yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2011. Mulai Tahun 2018, APN berubah nama menjadi PPD yang penilaiannya tidak hanya pada aspek perencanaan, namun juga meliputi pencapaian pelaksanaan pembangunan. Tahun 2022 Pemerintah Kota Palu mendapatkan penghargaan sepuluh bedar PPD Kategori Kota.</p>

No.	Dokumen Penghargaan	Jenis Penghargaan	Narasi
5.		Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM	Pemerintah Kota Palu mendapatkan penghargaan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penghargaan ini sebagai ganjaran atas keberhasilan organisasi perangkat daerah Kota Palu
6.		Pengelolaan Kenaikan Pangkat Berbasis Aplikasi	Pemerintah Kota Palu menerima penghargaan pengelolaan kenaikan pangkat berbasis aplikasi untuk periode kenaikan pangkat April dan Oktober 2022 oleh Badan Kepegawaian Negara Regional IV. Penghargaan dilakukan atas komitmen dan dedikasi Pemerintah Kota Palu dalam pengelolaan kenaikan pangkat dengan memanfaatkan aplikasi SI-ASN

No.	Dokumen Penghargaan	Jenis Penghargaan	Narasi
7.		<p>Juara I Jakarta <i>Fire Fighter Challenge Braveheart</i></p>	<p>Pemerintah Kota Palu menjadi juara pertama pada ajang Jakarta <i>Fire Fighter Challenge Braveheart</i> Tahun 2022. Lomba ini merupakan <i>event</i> diselenggarakan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Kompetisi dilakukan untuk mengadu ketangkasan para petugas kebencanaan yang ada di lapangan dalam hal evakuasi dan penyelamatan</p>



PEMERINTAH KOTA PALU

INSPEKTORAT DAERAH

JL. Letjen Soeprato No. 36 A Telp./Fax. (0451) 4018000 Palu

Palu, 31 Maret 2023

Nomor : 706/ 03 /-LHR/RHS/IB-I/ITKOT
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kota Palu Tahun 2022

Dengan ini kami sampaikan laporan Hasil Reviu Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2022 dengan tolak ukur Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2022-2026, dalam pemenuhan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang termuat beberapa komponen yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal serta dokumen lainnya yang mendukung dengan hasil sebagai berikut :

A. Pernyataan Reviu

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Intansi Pemerintah.

Substansi informasi yang termuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palu.

Pelaksanaan Reviu AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi AKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan reviu kami untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

B. Dasar Reviu

Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2022 berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Intansi Pemerintah.
2. Surat Perintah Walikota Palu Nomor: 700/1.2.0 /Itkot/2023 tanggal 20 Maret 2023.

C. Tata Cara Reviu

1. Pihak yang melaksanakan reviu :

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Muliati, S.H,M.M,M.H	Penanggung Jawab
2	Fachrudin MG. Abd. Karim, SP., M.Si	Wakil Penanggungjawab
3	Arry Hartanto Soenjoto, S.T.	Pengendali Teknis
4	Arif Rahman, S.Sos., M,Si	Ketua Tim
5	Sutrini, S.Sos., M.M	Anggota Tim
6	Farida Pakamundi, S.Sos	Anggota Tim
7	Gracious Madamba, S.E., M.M	Anggota Tim
8	Ika Listiyani, S.T.	Anggota Tim

D. Tujuan Reviu

Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah :

- a. Membantu penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Memberikan keyakinan, terbantas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

E. Ruang lingkup pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan reviu AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi AKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

F. Simpulan dan Rekomendasi

1. Simpulan

Reviu dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta terdapat beberapa rekomendasi kami mengarah perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Reviu atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Proses penyusunan laporan tersebut telah melalui proses mekanisme penyusunan yang memadai, namun masih terdapat kelemahan - kelemahan dalam pengendalian, kelemahan tersebut sebagai berikut :

1. Mekanisme penyusunan

- a. Dokumen SAKIP belum disesuaikan dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, dan Pemda Kota Palu telah melakukan perumusan kembali sasaran strategis pada level Pemerintah Daerah agar lebih mengutamakan kondisi kinerja yang menjawab isu strategis dan menggambarkan kondisi hasil/*outcome* pada level Pemerintah Daerah, namun perubahan tersebut diterapkan pada tahun 2023 sebagaimana *coaching* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu bersama tim evaluator Kementerian PAN-RB.
- b. Kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah Belum dapat melakukan perubahan dokumen perencanaan yaitu (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja) yang terukur, relevan, dan cukup serta menjawab isu strategis.;
- c. Kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah belum melakukan penyusunan dalam laporan kinerja untuk memasukan perubahan perjanjian kinerja.

2. Substansi

- a. Menyempurnakan penyusunan penjabaran kinerja (*cascading*) berdasarkan kerangka berpikir logis (*logical framework*) sehingga tercipta hubungan kausalitas antar kinerja berjenjang, serta dapat diselaraskan dengan proses bisnis organisasi dan penganggaran agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi;
- b. Menggunakan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan, dan sebagai dasar pemberian *rewards and punishment*. Aplikasi ini juga diharapkan dapat mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang semakin handal serta meningkatkan kualitas laporan kinerja. Selain itu, diharapkan aplikasi ini dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan tingkat kinerja;

G. Rekomendasi

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, direkomendasikan kepada Walikota Palu kiranya dapat memerintahkan kepada Sekretaris daerah Kota Palu agar :

a. Dalam Hal Mekanisme Penyusunan :

- a) Dokumen SAKIP disesuaikan dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, dan Pemda Kota Palu telah melakukan perumusan kembali sasaran strategis pada level Pemerintah Daerah agar lebih mengutamakan kondisi kinerja yang menjawab isu strategis dan menggambarkan kondisi hasil/*outcome* pada level Pemerintah Daerah, namun perubahan tersebut diterapkan pada tahun 2023 sebagaimana *coaching* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu bersama tim

evaluator Kementerian PAN-RB.

- b) kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah agar dapat melakukan perubahan dokumen perencanaan yaitu (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja) yang terukur, relevan, dan cukup serta menjawab isu strategis.;
- c) kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah agar melakukan penyusunan dalam laporan kinerja untuk memasukan perubahan perjanjian kinerja.

b. Dalam Hal Substansi

- a) Menyempurnakan penyusunan penjabaran kinerja (*cascading*) berdasarkan kerangka berpikir logis (*logical framework*) sehingga tercipta hubungan kausalitas antar kinerja berjenjang, serta dapat diselaraskan dengan proses bisnis organisasi dan penganggaran agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi;
- b) Menggunakan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan, dan sebagai dasar pemberian *rewards and punishment*. Aplikasi ini juga diharapkan dapat mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang semakin handal serta meningkatkan kualitas laporan kinerja. Selain itu, diharapkan aplikasi ini dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan tingkat kinerja;

H. Tindak Lanjut Hasil reuiu sebelumnya

Saran dari Tim reuiu tahun lalu belum semua ditindaklanjuti

Demikian hasil reuiu ini kami sampaikan sebagai bahan perbaikan lebih lanjut.



INSPEKTUR,

MULIATI, S.H, M.M.,M.H

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650805 199203 2 014

CHECKLIST REVIU

NO	PERNYATAAN		CHEK LIST	
	I. Format	1	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	Ya
		2	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	Ya
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	Ya
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	Ya
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	Ya
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	Ya
	II Mekanisme penyusunan			Ya
		1	LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	Ya
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	Ya
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	Ya
		4	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	Ya
		5	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	Ya
		6	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	Ya
		7	LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	Ya
	III. Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	Ya
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	Ya
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	Ya
		4	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	Ya
		5	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran yang memadai	Ya
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	Ya
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	Ya
		8	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	Ya
		9	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	Ya
		10	IKU dan IK telah SMART	Ya